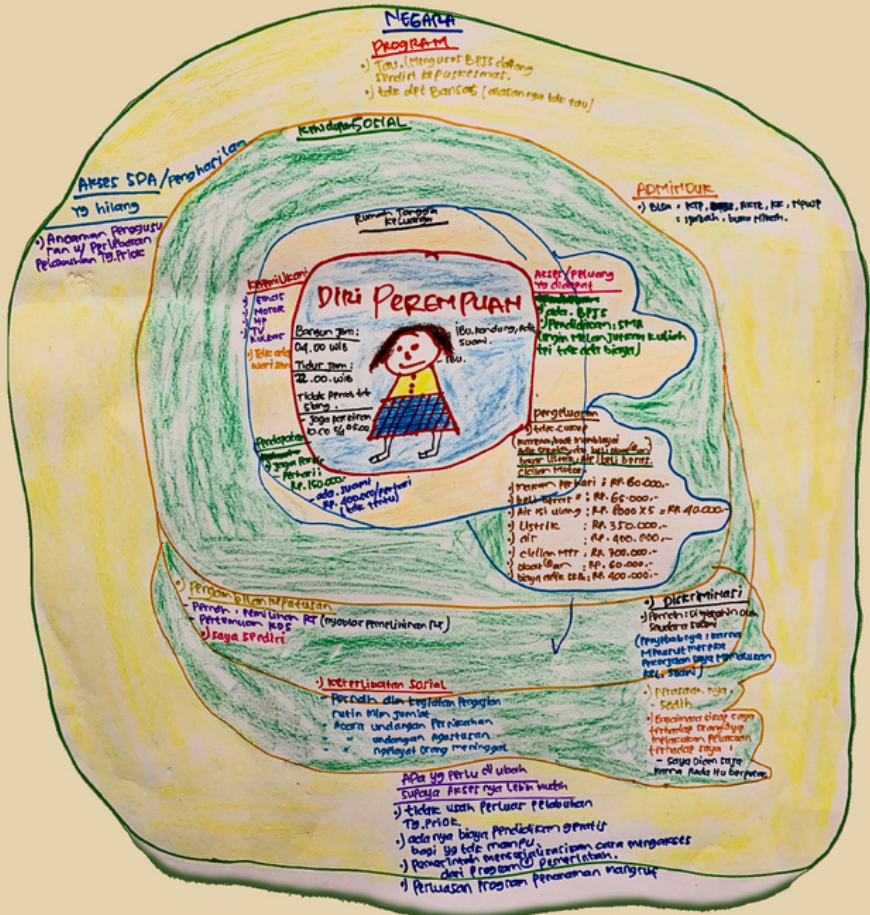


Potret Perempuan dalam Ketidakadilan Gender dan Ekonomi di Indonesia

Prosiding Konsultasi di 10 Kota



JUDUL:

Potret Perempuan dalam
Ketidakadilan Gender dan Ekonomi
di Indonesia:
Prosiding Konsultasi di 10 Kota.

EDITOR:

Titi Soentoro/Marhaini Nasution.

PEWAJAH SAMPUL & ISI:

Yayaka

CETAKAN PERTAMA: Mei 2023

HALAMAN: x+128

UKURAN: 14x21cm

DITERBITKAN: Aksi! for gender,
social and ecological justice. Dengan
dukungan dari European Union.



Aksi! for gender, social and ecological justice didirikan oleh enam feminis Indonesia pada tanggal 10 Desember 2012 dengan keinginan mempengaruhi wacana dan perdebatan mengenai pembangunan, lingkungan, dan perubahan iklim untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan komunitas mereka, serta mendukung usaha-usaha perempuan akar rumput dalam memperjuangkan hak-haknya. Aksi! yakin bahwa memperkuat gerakan perempuan untuk keadilan pembangunan, ekonomi, dan iklim, akan memajukan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Tiga strategi dikembangkan, yaitu membangun kapasitas untuk memberdayakan perempuan, kampanye untuk memperkuat dan memperoleh dukungan untuk suara perempuan, dan advokasi untuk perubahan kebijakan.

Alamat: Rambutan Raya No.79 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510,
Indonesia.

Email: sekretariat@aksiforjustice.org

Website: www.aksiforjustice.org

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Singkatan..... | v |
| Prakata..... | vii |
| Ringkasan Eksekutif..... | 1 |
| Pengantar | 17 |
| Metode Penggalan Informasi Mengenai Perempuan..... | 19 |
| Potret Perempuan di 10 Kota Indonesia..... | 23 |
| Konsultasi di Kota Jayapura | 25 |
| Konsultasi di Kota Purwokerto | 33 |
| Konsultasi di Kota Makassar | 45 |
| Konsultasi di Kota Ambon | 55 |
| Konsultasi di Kota Bengkulu | 65 |
| Konsultasi di Desa Tabanan | 77 |
| Konsultasi di Kota Prapat | 85 |
| Konsultasi di Kota Kupang..... | 95 |
| Konsultasi di DKI Jakarta | 105 |
| Konsultasi di Kota Palangkaraya | 117 |
| Penutup | 126 |

Daftar Singkatan

| | |
|----------------|--|
| ATR/BPN | Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional |
| BLT | Bantuan Langsung Tunai |
| BOS | Bantuan Operasional Sekolah |
| BPJS | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial |
| KDRT | Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| KIS | Kartu Indonesia Sehat |
| KLHK | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| KTA | Kredit Tanpa Anggungan |
| KUR | Kredit Usaha Rakyat |
| LGBTIQ | Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, and Questioning |
| PAUD | Pendidikan Anak Usia Dini |
| PDAM | Perusahaan Daerah Air Minum |
| PIP | Program Indonesia Pintar |
| PKH | Program Keluarga Harapan |
| PKK | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga |
| PLTA | Pembangkit Listrik Tenaga Air |
| SDA | Sumberdaya Alam |
| SKTM | Surat Keterangan Tidak Mampu |
| TPL | Toba Pulp Lestari |

Prakata

Aksi! for gender, social and ecological justice telah melakukan konsultasi di 10 kota Indonesia untuk mendapatkan potret perempuan miskin dari berbagai sektor dan wilayah. Konsultasi di 10 kota bertema ‘Perempuan Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Menguatkan Suara Perempuan’ bertujuan untuk menggali dan bertukar informasi mengenai situasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang dialami perempuan, penyebabnya maupun apa yang menurut perempuan perlu diubah atau diperbaiki.

Konsultasi di 10 kota ini, dihadiri oleh 260 perempuan akar rumput dari berbagai ruang kehidupan baik dari kota itu sendiri maupun wilayah di sekitarnya, merupakan sebuah titik berangkat untuk melakukan dialog di tingkat nasional maupun lokal dengan para pemangku kepentingan jalinan gender, ketimpangan ekonomi dan feminisasi kemiskinan di Indonesia. Mereka adalah pemerintah, swasta, lembaga internasional maupun lembaga keuangan internasional, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga yang melakukan pendampingan kepada hak-hak azasi manusia, hak azasi perempuan dan kelompok rentan dan marjinal

lainnya, maupun perempuan akar rumput yang berada di garis depan persoalan. Dialog dan interaksi di antara para pemangku kepentingan tanpa ada keharusan untuk mencapai sebuah kesepakatan, diharapkan akan membangun pemahaman yang lebih baik terhadap cara pandang masing-masing secara lebih jujur dan terbuka, dan mendorong gagasan strategis dan kreatif untuk mengatasi persoalan ketimpangan gender dan ekonomi serta feminisasi kemiskinan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Kegiatan ini merupakan sebuah kerjasama Aksi! for gender, social and ecological justice dan Solidaritas Perempuan di Indonesia dan beberapa organisasi internasional seperti ARUN - SKA (Association for Rural & Urban Needy - Safai Karmachari Andolan) dan Swadhikar - National Campaign for Dalit Human Rights (NCDHR) di India, Eurodad (European Network on Debt & Development) di Belgia, serta Asia People's Movement on Debt and Development (APMDD) dan SSID (Society for International Development) yang merupakan organisasi jaringan internasional. European Commission memberikan dukungan finansial terhadap kerja sama ini untuk berbagai kegiatan selain konsultasi perempuan dan dialog multipihak, seperti riset, konsultasi, diskusi, kampanye dan advokasi.

Penerbitan prosiding konsultasi di 10 kota Indonesia ini merupakan ruang yang disediakan untuk membantu menyuarakan persoalan ketimpangan gender dan ekonomi yang dihadapi terutama oleh perempuan di garis depan persoalan ini, yaitu perempuan miskin.

Prosiding konsultasi di 10 kota ini memperlihatkan realitas perempuan dalam situasi kemiskinan, proses pemiskinan dan ketidakadilan. Selanjutnya, prosiding ini juga menggambarkan pemahaman perempuan terhadap persoalannya dan analisis mereka terhadap persoalan yang dihadapi, yaitu kausalitas faktor-faktor kemiskinan, pemiskinan dan ketidakadilan dalam konteks jalinan kekuasaan patriarki, globalisasi, mili tarisme dan fundamentalisme.

Harapannya, melalui prosiding ini kita dapat melihat situasi perempuan dari cara pandang mereka sendiri, memahami persoalan mereka dan aspirasi perubahan yang mereka inginkan, dan selanjutnya mengembangkan usaha bersama untuk membantu mereka, keluarga dan komunitasnya menghadapi situasi ketimpangan dan ketidakadilan yang mereka hadapi.

Jakarta, 10 Desember 2022

Titi Soentoro

Direktur Eksekutif Aksi! for gender, social and ecological justice

Ringkasan Eksekutif

KONSULTASI di 10 Kota dengan tema '*Perempuan Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Menguatkan Suara Perempuan*' memperlihatkan interseksionalitas dan kausalitas persoalan kemiskinan perempuan, demikian juga suara hati perempuan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik bagi diri dan keluarganya.

Perjuangan perempuan untuk mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya

Perjuangan perempuan miskin untuk mempertahankan kehidupan diri dan keluarganya seperti yang terkuak dari konsultasi di 10 kota, mulai sejak mereka bangun pagi sekitar pukul 3.30 sampai mereka berangkat tidur kembali sekitar jam 23.00. Artinya, kebanyakan perempuan bekerja sehari-hari sekitar 18,5 jam per hari. Mereka begitu sibuknya dengan kerjanya yang beragam, mulai dari mengurus rumah sampai dengan bekerja di luar rumah ataupun mencari penghasilan tambahan tanpa ada waktu istirahat yang cukup.

Mereka memulai kegiatannya di pagi hari dengan membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mengurus anak untuk ke sekolah dan menyiapkan makan siang keluarga. Setelah itu mereka keluar rumah untuk berbagai pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan. Pulang dari bekerja di luar rumah, mereka biasanya menyiapkan makan malam keluarga, sekali lagi membersihkan rumah dan kerja domestik lainnya.

Setelah itu mengurus suami yang pulang dari bekerja dan anak, seperti menemani belajar dan mengerjakan tugas sekolah, sampai malam hari. Merawat orang tua sakit ataupun mengurus adik, cucu ataupun keponakan, juga merupakan bagian dari kerja perempuan.

Salah satu contoh adalah kerja perempuan nelayan sela ma 1 hari yang diperoleh dari Konsultasi Kota Kupang: *Perempuan nelayan yang akan pergi melaut biasanya sebelum berangkat pada jam 3.00, akan terlebih dahulu menyiapkan makan untuk anak-anak dan keluarganya. Setelah itu dia melaut sampai jam 14.00. Pulang ke rumah untuk beristirahat sejenak selama 2 jam, lalu masak untuk keluarga dan berangkat lagi ke laut jam 17.00 sampai sekitar pukul 20.00.*

Sementara perempuan nelayan yang tidak pergi melaut tetapi suaminya yang pergi, dia tetap harus bangun dini hari untuk menyiapkan kebutuhan melaut suami seperti menyiapkan umpan dan kotak pendingin (coolbox), lalu menyiapkan makan keluarga, pakaian anak sekolah, dan menyiapkan makanan untuk suami pulang melaut di siang hari, menjemput suami di pantai dan menjual ikan yang ditangkap suami di pantai.

Di samping itu harus membuat kue untuk jualan sebagai tambahan penghasilan. Setelah itu menyiapkan perbekalan suami lagi yang akan melaut pada siang hari pukul 14.30, lalu membantu anakanak mengaji, mencuci pakaian, merapihkan rumah, menyapu, mengepel, dan melipat pakaian. Semua itu dilakukan hingga pukul 23.00 malam.

Selain bekerja mengurus rumah perempuan nelayan juga pergi melaut mencari ikan, atau bagi yang tidak pergi melaut mereka akan mencari kerang dan mengolah hasil laut seperti mengeringkan ikan ataupun berjualan ikan. Ada juga yang berjualan kue. Penghasilan perempuan dari usahanya tersebut rata-rata paling sedikit adalah Rp 20.000/ hari dan terbanyak rata-rata Rp.300.000/hari. Ada berbagai variasi penghasilan, tergantung wilayahnya.

Kerja perempuan tani beragam. Kerja dengan penghasilan paling sedikit adalah mengumpulkan dan menjual sisa-sisa padi (ngunu, dalam bahasa Jawa) dan mendapatkan Rp 35.000 di masa panen. Bila tidak ada panen, maka tidak ada penghasilan. Ada juga yang penghasilannya dari berjualan sayur hasil kebun sendiri, memanfaatkan lahan di sela-sela kebun karet atau tebu untuk menanam tanaman pangan ataupun mengolah pisang menjadi berbagai produk.

Buruh tani dan penggarap mempunyai penghasilan beragam, rata-rata sekitar Rp 100.000 - Rp 200.000/hari tergantung lahan yang diagram dan tanaman. Perempuan nyadap karet menerima pendapatan sekitar Rp 50.000-150.000 per hari; sementara buruh perkebunan kelapa sawit sekitar Rp 116.000 per hari.

Pendapatan ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari untuk membeli sembako, membayar transportasi, sekolah anak, listrik, cicilan motor, jajan anak, maupun rokok suami.

Perempuan yang beraktivitas di sektor informal dan hadir dalam konsultasi di 10 kota tersebut, sangatlah beragam, antara lain buruh batik, pemilik warung, juru parkir, buruh migran, buruh industri, penjual pakaian dan gorengan, miskin kota, penjual kelapa, jasa pijat, pemandu acara, pedagang kaki lima yang menjual kue dan gorengan, sepatu, buah dan sembako, penjahit, pengusaha katering, pengelola paud, usaha salon, pekerja rumah tangga, pedagang pasar, pemulung, pengemudi ojek online, buruh kantor, penjaga toko, penenun tradisional, buruh produsen tuak tradisional, pencuci pakaian, pedagang kaki lima, pengamen, pekerja rumahan, pekerja seks, berjualan online, penyewaan mobil, mengajar les privat, memproduksi herbal, dan pekerja sosial disabilitas. Penghasilan mereka yang dari berbagai jenis pekerjaan tersebut, beragam, mulai dari Rp 20.000/hari sampai paling tinggi Rp 150.000/hari.

Perempuan penyandang disabilitas yang penghasilannya rata-rata sekitar Rp.200.000/bulan, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan sandang dan papan. Pakaian yang digunakan hanya pakaian bekas yang diberi oleh orang lain

Penghasilan para perempuan tersebut secara umum habis untuk belanja kebutuhan makanan sehari-hari seperti beras dan lauk-pauk, minyak goreng, gula dan teh; malah banyak yang mengatakan bahwa itu pun tidak cukup banyak

yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga lainnya seperti uang sekolah dan kebutuhan anak sekolah, apalagi untuk membayar cicilan rumah, iuran BPJS, air dan listrik. Mereka yang berpenghasilan yang lebih tinggi bisa juga untuk membayar listrik dan kebutuhan sekolah, maupun untuk membayar cicilan sewa tanah, motor, dan lainnya.

Namun penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk berobat ke dokter atau rumah sakit yang mahal harganya. Apabila ada kegiatan keluarga besar, maka pengeluaran akan bertambah. Ketidaktersediaan air bersih menyebabkan mereka harus menambah pengeluaran untuk membeli air.

Apabila penghasilan tidak mencukupi, mereka terpaksa melakukan berbagai pekerjaan, atau berhutang ke tetangga dan saudara, atau menggadaikan barang yang ada. Dalam situasi demikian pembayaran sekolah anak biasanya dilakukan dengan mencicil. Walaupun kadang-kadang ada tambahan penghasilan dari orang serumah seperti dari suami, anak, saudara, orang tua dan keponakan, tetaplah tidak mencukupi.

Secara umum perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tua mereka. Hanya sedikit perempuan yang mendapatkan warisan tanah atau rumah. Tidak adanya harta atau tabungan maupun warisan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan hidup dalam kemiskinan yang terus-menerus dari generasi ke generasi.

Sebagian besar perempuan tidak memiliki aset seperti rumah, motor, tanah. Aset keluarga seperti motor, tanah, rumah, mobil atau usaha, biasanya atas nama suami. Pe-

rempuan tidak dapat menggunakan aset keluarga tersebut tanpa ijin dari suami.

Kekerasan terhadap perempuan

Banyak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak saja dilakukan oleh suami, tetapi juga oleh mertua dan ipar. Pengalaman dianggap tidak mampu mengurus mertua dan kakan ipar sehingga kemudian diusir oleh suami, juga ada.

Kekerasan terhadap perempuan juga banyak terjadi di ranah publik, biasanya merupakan kekerasan verbal, perlakuan diskriminatif dan pengucilan. Misalnya, perempuan beranak banyak dihina sebagai tidak akan mampu memberi makan anak; perempuan yang aktif memperjuangkan hak atas tanah pun sering dilecehkan sebagai ‘miskin tapi sibuk’.

Situasi miskin sering merupakan sebab pelecehan sosial dengan dianggap bodoh, dikucilkan, dan tidak diundang dalam kegiatan kampung. Janda mengalami kekerasan psikis karena identitasnya sebagai janda. Ketika pulang malam, ia kerap kali mendapatkan stigma sebagai perempuan nakal penggoda suami orang. Perempuan yang bercerai sering mendapatkan penghinaan, dicaci maki serta dikucilkan oleh orang lain dan bahkan oleh keluarga sendiri.

Perempuan penyandang disabilitas pun tidak luput dari kekerasan di ranah publik. Mereka mengalami diskriminasi karena bentuk tubuhnya yang tidak “sempurna”. Atau, tidak diperbolehkan untuk tampil di depan umum karena

dianggap memalukan keluarga. Mereka sering juga mengalami pengabaian, yaitu kesulitan untuk bergerak di ruang publik karena tidak tersedia sarana khusus untuk mereka, misalnya jalan khusus untuk kursi roda.

Perempuan miskin seringkali mengalami kekerasan di dalam rumah tangga maupun di ranah publik, dan mereka menerimanya dengan pasrah karena mereka sendiri kemudian menganggap dirinya lemah dan tidak berdaya. Walaupun di lain pihak mereka merasa sedih, marah, benci, terhina, sakit hati, kecewa, stres, terpuruk, malu, ingin melarikan diri, dan malah ada yang pernah berpikir untuk melompat ke dalam sumur.

Perempuan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial

Perempuan biasanya dilibatkan dalam kegiatan sosial yang berlangsung di kampungnya seperti ibadah, kedukaan, acara pernikahan, upacara adat, kerja bakti, dan hari-hari besar budaya maupun nasional lainnya. Bagi mereka yang menjadi anggota PKK, mereka dilibatkan dalam kegiatan PKK dan Posyandu.

Namun perempuan tidak diundang dan dilibatkan dalam pertemuan musyawarah kampung, murendus (musyawarah dusun) dan musrembang (musyawarah pembangunan), rencana proyek pembangunan yang akan masuk ke daerahnya. Hanya laki-laki atau kepala keluarga yang diundang. Perempuan tidak diakui sebagai kepala keluarga. Bahkan ada pernyataan bahwa *“perempuan lebih cocok tinggal di rumah sehingga tidak perlu diundang dalam rapat.”*

Namun pernah juga perempuan hadir dalam rapat sosialisasi bantuan pemerintah seperti penjelasan seorang buruh kebun yang hadir dalam konsultasi kota Palangkaraya. “... pernah diundang dalam rapat RT untuk sosialisasi bantuan sosial. Hadir atas nama suami karena suami sedang sakit’. Beberapa perempuan lain pun menceritakan hal yang serupa. Bisa hadir dalam rapat desa untuk menggantikan suami yang berhalangan hadir. Selain itu, upacara adat hanya melibatkan laki-laki, sangat jarang perempuan karena dianggap sebagai acara yang sakral.

Perempuan lajang atau janda jarang dimintai pendapat karena dianggap tidak mengetahui persoalan di kampungnya. Selain itu, perempuan yang diketahui terlibat melawan proyek pemerintah dan perusahaan yang ada di daerah, tidak pernah ditanyai maupun diberikan informasi mengenai berbagai program pemerintah.

Perempuan sebagai warga negara

Beberapa pendapat yang muncul dalam konsultasi bahwa kemiskinan yang dihadapi perempuan adalah karena tidak ada atau kekurangannya akses, yaitu: (a) akses ke pendidikan. Banyak perempuan tidak lulus SD atau hanya tamatan SD, namun ada juga yang mengecap SMP dan SMA. Alasan tidak melanjutkan sekolah adalah karena keadaan ekonomi orang tua yang sulit, atau orang tua meninggal saat mereka masih kecil; (b) kecilnya akses ke pekerjaan yang layak dan hanya mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan rendah, dan tidak ada jaminan sosial dalam pekerjaan, (c) kurangnya akses ke kesehatan dasar.

Akses perempuan ke modal pun hampir tidak ada. Perempuan miskin bisa meminjam ke bank atau koperasi untuk membeli bibit dan pupuk hanya bila mereka menjadi anggota kelompok tani atau koperasi. Mereka bisa membeli motor maupun perabotan rumah tangga secara kredit. Namun pendapatan/penghasilan yang sedikit menutup akses mereka untuk membeli rumah secara kredit.

Akses ke bantuan sosial pemerintah:

Banyak perempuan mengetahui program-program bantuan sosial pemerintah seperti misalnya Kartu Merah Putih, BPJS Kesehatan, KIS, BLT, PIP dan dana BOS.

Mereka umumnya bisa mengakses bantuan sosial tersebut. Namun ada yang bisa mengakses hanya sebagian, misalnya biaya BPJS menjadi pertimbangan bagi mereka yang berpendapatan rendah karena harus memilih membayar BPJS atau untuk kebutuhan makan sehingga tidak memiliki BPJS Kesehatan; atau tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ada juga bantuan yang tidak bisa diakses perempuan karena tidak memiliki kartu tani atau kartu nelayan yang hanya diberikan kepada laki-laki. Perempuan, misalnya, tidak diakui sebagai nelayan akibat definisi sempit pemerintah mengenai nelayan.

Mereka yang tidak bisa atau menghadapi kesulitan untuk mengakses program-program tersebut, dikarenakan antara lain:

- kekurangan informasi maupun cara untuk mengakses;
- tidak diundang atas nama perempuan, tetapi suami;
- nama tidak terdata oleh kantor desa;

- harus menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan memiliki buku rekening bank;
- tidak memiliki KK dan KTP sebagai syarat utama untuk mendapatkannya; ataupun tidak bisa memenuhi syarat memiliki rekening bank;
- menolak proyek pembangunan dan perusahaan di daerahnya.

Ketidakpuasan juga terlihat mengenai ketidakadilan dalam pembagian program pemerintah. Contohnya adalah bantuan beras miskin dibagi merata, baik kaya maupun miskin mendapatkan. Padahal seharusnya, bantuan beras miskin adalah untuk keluarga miskin.

Akses ke pelayanan administrasi negara kebanyakan perempuan dapat mengakses pelayanan administrasi negara untuk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah, PBB, surat tanah dan SKTM meski terkadang perempuan harus mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Yang sulit adalah mengakses program sertifikasi tanah (Prona) ataupun mendapatkan karena mahal biaya pengurusan dan mereka tidak memiliki yang untuk mengurusnya.

Bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah terpencil, sulit untuk mendapatkan sertifikat tanah karena faktor jarak dan proses yang lama. Sistem online yang digunakan juga menyebabkan mereka yang hidup di wilayah terpencil, sulit mengaksesnya.

Pelayanan publik seperti kesehatan dan air bersih sebagai kebutuhan dasar, sangat sulit diperoleh menurut pandangan banyak perempuan.

Selain memang pelayanan yang buruk walaupun sudah diswastanisasi. Ada juga karena dianggap wilayah tempat tinggalnya ilegal. Akibatnya, pengeluaran bertambah karena harus membeli air bersih.

Akses ke sumber-sumber penghasilan:

Ada berbagai faktor yang menyebabkan kesulitan perempuan nelayan untuk mendapatkan akses ke sumberdaya laut. Proyek-proyek seperti Makassar New Port (MNP), pembangunan kawasan wisata dengan hotel-hotel, pembangunan tanggul-tanggul raksasa penahan tombak akibat naiknya permukaan air laut, menutup akses mereka ke sumber-sumber penghasilan. Salah satu korban proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) di Gunung Slamet bercerita:

“...mata pencaharian kami hilang pada waktu pengeboran gunung Slamet yang limbahnya dibuang ke kaki gunung sehingga menyebabkan polusi lumpur ke sungaisungai dan mata air. Kekeruhan yang diakibatkan juga berimbas pada air yang dibutuhkan untuk pemijahan ikan gurami dan lele. Karena air keruh, ikanikan yang diternakan mati semua. Selama dua tahun tidak bisa beternak dan panen ikan.”

Pembangunan proyek-proyek di wilayah pesisir menyebabkan warga digusur ke arah darat dan sehingga mereka sulit mengakses laut. Padahal laut merupakan sumber mata pencaharian utama perempuan untuk mendapatkan ikan dan kerang untuk dijual di pasar terdekat. Jika pun bisa melaut, aksesnya makin jauh, pengeluaran untuk membeli bahan bakar semakin tinggi sementara pendapatan/penghasilan mencari ikan semakin kurang. Lagipula kebanya-

kan nelayan tidak memiliki perahu sendiri yang memadai untuk menangkap ikan di laut yang lebih jauh.

Masalah lain yang dihadapi adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang merusak terumbu karang dan pencemaran laut akibat sampah plastik. Akibatnya, hasil tangkapan berkurang sehingga nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan sementara biaya bahan bakar perahu menjadi sangat mahal. Di lain pihak pencemaran juga menyebabkan penyakit sehingga pengeluaran untuk biaya berobat meningkat.

Tanaman bakau yang dulu banyak ada di pesisir pantai sehingga membuat wilayah di sekitarnya hijau dan segar, kini sudah habis ditebang dan wilayah menjadi gersang. Selain itu pemerintah tidak lagi menyediakan bibit tanaman bakau.

Perubahan iklim pun akibat kenaikan permukaan laut (rob), menyebabkan wilayah pesisir terendam. Akibatnya, sumber-sumber kehidupan seperti tambak, lahan usaha industri batik maupun rumah-rumah penduduk hilang. Penduduk pun menjadi tergesur.

Perempuan yang kehidupannya bergantung pada hasil hutan dan kebun, menjadi makin sulit untuk mengakses sumberdaya alam, antara lain karena masuknya perkebunan kelapa sawit, proyek energi dan proyek tambang yang mengakibatkan hutan menjadi tandus dan kering; wilayah hutan/kebun direbut dan lalu warga dilarang masuk ke wilayah yang dikuasai pemerintah dan perusahaan. Tidak hanya sumber makanan yang hilang, tetapi hasil hutan se-

perti madu, kayu alam, obat-obatan, hewan hutan, dan lainnya. Kesulitan mendapatkan air bersih juga menjadi salah satu akibat dari penguasaan lahan untuk proyek-proyek tersebut.

Maraknya perusahaan air minum yang menguasai sumber-sumber mata air, justru menyebabkan warga sekitar kekurangan air bersih. Air yang mereka gunakan setiap harinya hanya bersumber pada sumur. Jika musim kemarau, sumurnya kering dan jika musim hujan airnya keruh. Selain itu mereka kesulitan mengakses air karena jarak tempuh antara pemukiman dan sumber air jauh, sementara tidak tersedia fasilitas untuk memudahkan akses masyarakat ke sumber air.

Tidak saja pengusuran dari wilayah hutan dan lahan yang menyebabkan perempuan kehilangan sumber-sumber penghasilan dan meningkatkan kemiskinan, melainkan juga pengusuran di wilayah perkotaan. Bagi mereka yang dituduh oleh pemerintah kota setempat sebagai pendatang ilegal, wilayah hunian mereka tidak mendapatkan pasokan air dari PDAM dan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan harian rumah. Akses untuk mendapatkan kerja juga sulit bagi kelompok miskin karena keterbatasan dalam berbagai hal seperti pendidikan maupun keterampilan.

Perempuan ingin perubahan kehidupan diri dan keluarganya

Secara umum perempuan ingin bahwa negara menjaga dan merawat perdamaian, melindungi hak-hak mereka, membuat peraturan perundangan dan kebijakan yang melindungi perempuan dan keluarga miskin, mengembangkan

program yang mampu memberdayakan perempuan dan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, menyediakan akses pekerjaan secara mudah dan layak bagi perempuan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Negara juga perlu memberikan ruang yang sama bagi komunitas LGBTIQ.

Negara perlu mencabut UU Cipta Kerja yang merugikan hak-hak perempuan, mengesahkan RUU PRT untuk kesejahteraan pekerja rumah tangga, melindungi hak-hak buruh, mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Selain itu negara harus mengakui wilayah masyarakat dengan antara lain melakukan evaluasi terhadap kinerja KLHK, Kementerian ATR/BPN. “...*Pertambahan seyogyanya atas perizinan masyarakat setempat*”, demikian menurut seorang perempuan penyadap karet saat konsultasi di Kota Palangkaraya.

Dalam hal sumberdaya alam, perempuan menginginkan agar pemerintah bertanggung jawab untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah dirusak akibat kegiatan proyek pemerintah maupun perusahaan. Juga melakukan usaha-usaha terhadap kondisi hilangnya tanah, kebun dan sawah akibat abrasi serta ancaman hilangnya tempat tinggal masyarakat karena situasi perubahan iklim.

Secara khusus perempuan tani menginginkan agar negara menyusun peraturan daerah tentang perlindungan petani. Perempuan juga perlu punya kartu tani. Perempuan nelayan menuntut akses untuk melaut, termasuk izin nelayan, memberi bantuan alat tangkap seperti perahu, jaring, demikian juga tempat atau lokasi yang layak di pasar untuk menjual hasil tangkapan laut. Menghentikan pembangunan

proyek-proyek di wilayah pesisir yang telah merugikan nelayan, termasuk perempuan, dan menyediakan ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan sejak adanya proyek-proyek tersebut, serta mengembalikan fungsi lingkungan sebagai sebagaimana semula, dan penghijauan kembali kawasan pesisir. Guru honorer harusnya dihormati dan gajinya harus bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Perempuan penyandang disabilitas perlu dipenuhi hak-haknya, memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka dengan proses yang mudah dan tidak menyulitkan, seperti misalnya bantuan untuk memperbaiki rumah. Selain itu secara khusus di Kalimantan Tengah pemerintah daerah segera melakukan pengesahan peraturan daerah yang diusulkan oleh 7 (tujuh) organisasi disabilitas.

Layanan administrasi negara perlu terjangkau secara mudah bagi semua orang dan secara khusus memprioritaskan layanan untuk masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Pemerintah perlu memperbaiki data kemiskinan, terutama daftar mereka yang layak menerima bantuan sosial pemerintah. Dengan demikian bantuan sosial tidak salah sasaran dan masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan, bisa menerimanya. Keterbukaan informasi harus ada mengenai bantuan apa saja yang disediakan untuk masyarakat miskin dan secara khusus memperhatikan kebutuhan perempuan dengan mempermudah akses mereka.

Perempuan ingin agar program bantuan pemerintah bisa dijangkau oleh masyarakat miskin, terutama perempuan dan lansia, dengan cara yang mudah. Karenanya sosialisasi

perlu dilakukan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Seorang perempuan dalam konsultasi di kota Ambon mengusulkan:

“...jika ingin perubahan, pemerintah atau pihak terkait, agar dapat turun langsung ke lapangan atau door to door, agar masalah perempuan dapat dilihat langsung dan ditangani secara tepat dengan program pemerintah”.

Baiknya juga melibatkan perempuan untuk mengaturnya. *“Perempuan perlu diberikan hak untuk terlibat dalam penge lolaan dana desa”*, demikian pendapat seorang perempuan dalam konsultasi kota di Kota Prapat. Pendidikan dan kesehatan gratis merupakan bantuan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat miskin, terutama pendidikan keterampilan.

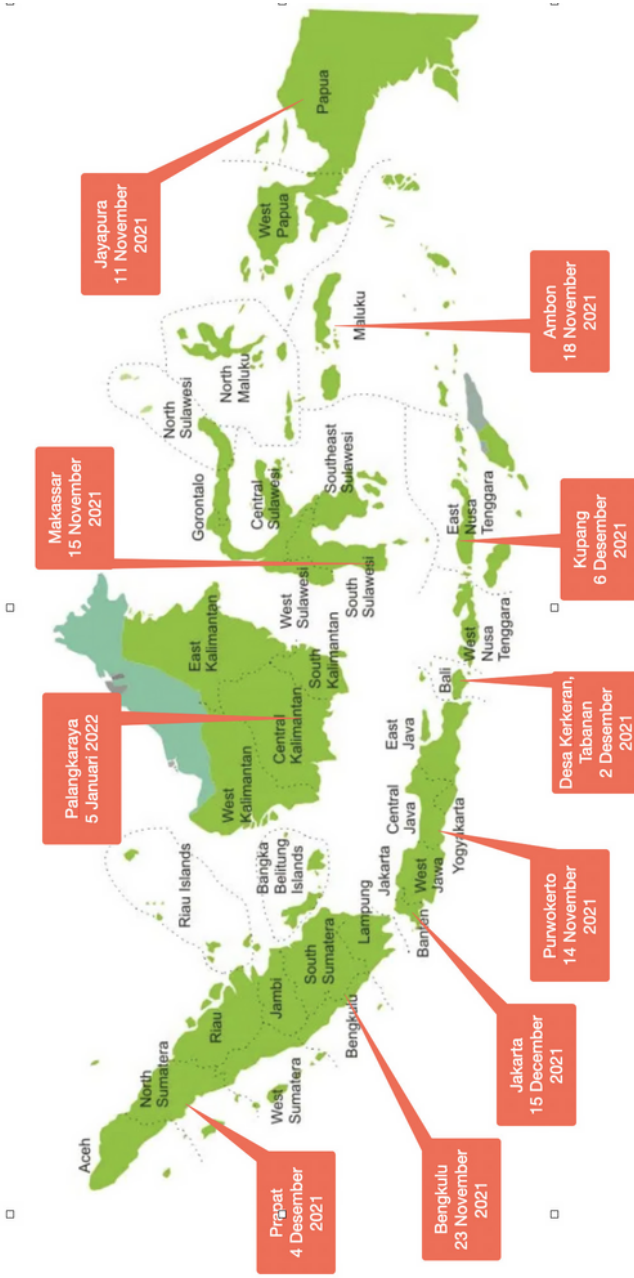
Ketersediaan air bersih juga merupakan hal yang perlu disediakan oleh negara kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin yang penghasilannya hanya jukup untuk membeli makanan. [A]

Pengantar

Aksi! for gender, social and ecological justice dan Solidaritas Perempuan akan mengadakan sebuah dialog multipihak di tahun 2023 mengenai perempuan dan ketidakadilan gender dan ekonomi di Indonesia. Untuk itu Aksi! melakukan konsultasi lokal di 10 kota di Indonesia antara bulan November 2021 sampai Januari 2022. Konsultasi dilakukan dengan bekerja sama dengan fasilitator-fasilitator lokal yang sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahulu di desa Borobudur, Jawa Tengah, pada bulan September dan Oktober 2021.

Konsultasi di 10 kota dengan tema *Perempuan Menghadapi Ketimpangan Ekonomi dan Menguatkan Suara Perempuan*, bertujuan untuk menggali dan berbagi informasi mengenai situasi ketimpangan yang dialami perempuan, penyebabnya maupun apa yang menurut perempuan perlu diubah/diperbaiki. Situasi dan aspirasi para perempuan tersebut akan dibawa ke dialog multipihak sebagai masukan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional dan lokal untuk memperhatikan pandangan perempuan, dan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender dan ekonomi yang dihadapi perempuan.

10 Konsultasi Lokal



Metode Penggalan Informasi Mengenai Perempuan

Metode yang digunakan dalam konsultasi adalah penggalan informasi perempuan mengenai dirinya sendiri, diri perempuan dalam keluarga, diri perempuan dalam kehidupan komunitasnya/sosial, dan diri perempuan dalam kehidupan negara. Dengan demikian terlihat interseksionalitas dan kausalitas (sebab-akibat) persoalan kemiskinan perempuan serta apa yang perempuan ingin ubah agar kehidupan diri, keluarga dan komunitasnya bisa lebih baik.

1. Penggalan informasi

Penggalan informasi dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai diri perempuan, perempuan dalam rumah tangga, perempuan dalam kehidupan sosial dan perempuan dalam negara.



Pertanyaan mengenai **Diri Perempuan**:

- bangun jam berapa di pagi hari dan kemudian pergi tidur di malam hari;
- Istirahat/tidur siang?
- Apa saja yang dikerjakan di rumah?
- Siapa saja yang tinggal bersama di rumah? Siapa saja yang dirawat di rumah?

Pertanyaan mengenai **Perempuan dalam Rumah Tangga**:

1. Penghasilan (biasanya dari sektor informal) atau pendapatan (biasanya dari sektor formal seperti gaji)

- Apakah melakukan kerja di luar rumah?
- Pendapatan/penghasilan yang diperoleh, biasanya berbentuk berupa uang dan/atau bukan berbentuk uang, dan berapa besarnya?
- Apakah ada anggota keluarga lain yang juga memperoleh pendapatan/penghasilan. Apakah tahu nilainya?

2. Pengeluaran

- Apakah penghasilan/pendapatan yang diperoleh bisa/cukup untuk membeli kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan dan air bersih?

3. Kepemilikan/properti:

- Apa saja barang yang dimiliki (misalnya: motor, tanah, dll)?
- Ada warisan keluarga?
- Akses (peluang atau bisa mendapatkan): Apa saja yang bisa diakses?

Pertanyaan mengenai **Perempuan dalam Kehidupan Sosial/Komunitas**

1. Diskriminasi

- Pernahkan mengalami perlakuan buruk (dikucilkan, dihina/dicaci, kekerasan, dan lainnya).
- Apakah mengetahui penyebabnya?
- Apa yang kamurasakan setelah mengalami hal tersebut?
- Bagaimana sikapmu terhadap mereka yang melakukan hal-hal tersebut kepada diarium atau keluargamu?

2. Pengambilan keputusan:

- Apakah diundang atau tidak dalam rapat desa/musrenbang/sosialisasi program pemerintah dan lainnya?
- Apabila ada undangan untuk rapat rapat desa/musrenbang/sosialisasi program pemerintah dan lainnya, yang ditujukan ke rumah/keluarga, siapa yang biasanya hadir?

3. Keterlibatan sosial

- Apakah terlibat atau tidak dalam kegiatan sosial di kampung (pesta perkawinan, upacara kematian, keagamaan, dan lainnya)?

Pertanyaan mengenai **Perempuan dalam Kehidupan Bernegara**

- Apakah bisa mendapatkan KTP, dan surat keterangan lain dari pemerintah desa? Kenapa kalau tidak bisa?
- Apakah mengetahui dan bisa memperoleh akses ke program pemerintah, misalnya BPJS, benih pertanian,

pendidikan, BOS, dan lainnya? Apabila bisa, ceritakan prosesnya; apabila tidak bisa, ceritakan alasannya. (Rinci setiap akses)

- Apakah ada akses ke sumberdaya alam dan penghasilan lain yang hilang?
- Apakah yang perlu berubah sehingga akses yang diinginkan bisa diperoleh dengan mudah?

2. Analisis Ketimpangan

Analisis situasi ketidakadilan gender dan ekonomi dilakukan dengan mengkaji apakah perempuan bisa atau tidak mendapatkan akses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila tidak bisa, maka ditelusuri alasan tidak mendapatkan akses tersebut dan apa dampak atau akibat dari tidak bisa mendapatkan akses tersebut terhadap kehidupannya. Dari jawaban yang diberikan, maka diperoleh gambaran mengenai situasi dan akibat ketidakadilan gender dan ekonomi bagi perempuan.

Selanjutnya, konsultasi menggali keinginan para perempuan untuk dapat memperbaiki kehidupan diri, keluarga dan komunitasnya; dan menghapus ketidakadilan gender dan ekonomi yang mereka hadapi.

Metode koding kualitatif kemudian digunakan untuk membangun ringkasan eksekutif dari hasil-hasil konsultasi di 10 kota tersebut. Beberapa kutipan dalam ringkasan eksekutif diambil dari rekaman verbatim saat konsultasi. [A]

Potret Perempuan
di 10 Kota Indonesia

Konsultasi di Jayapura

11 November 2021



KONSULTASI di Jayapura dihadiri oleh total 35 perempuan, tidak hanya dari Kota Jayapura dan kabupaten sekitarnya (kabupaten) tetapi juga dari kota/kabupaten yang jauh seperti Biak, Sorong, Serui, Nabire, Keerom dan Sarmi. Peserta berasal dari berbagai latar belakang, yaitu petani, perempuan nelayan, pekerja perkebunan, pekerja seks, perempuan adat, dan masyarakat miskin kota seperti pedagang kaki lima dan tukang parkir. 2 LSM pendukung juga turut mendampingi para peserta.

Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya

Perempuan di Papua umumnya bangun pagi pada pukul 04.30 untuk melakukan aktivitas rumah tangga seperti membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mengurus anak untuk ke sekolah dan menyiapkan makan siang keluarga. Mereka juga biasanya melakukan kegiatan gereja di siang hari, beraktivitas di laut, kebun/sawah/hutan, berjualan dan sebagai pekerja rumah tangga, sehingga perempuan tidak memiliki waktu untuk istirahat siang. Mereka biasanya tidur malam pada pukul 23.00 atau 01.00.



Mereka memiliki penghasilan kerja sendiri yang didapatkan dari hasil kebun, hasil melaut dan sebagai pekerja rumah tangga. Penghasilan yang mereka dapatkan beragam dan tidak menentu karena melakukan kerja harian, mulai Rp. 50.000 sampai Rp.750.000/hari.

Selain memperoleh penghasilan dari hasil kerja sendiri, mereka juga mendapatkan penghasilan dari suami atau keluarga. Penghasilan yang mereka dapatkan juga beragam tergantung jenis pekerjaannya. Misalnya pensiunan orang tua yang di dapat sebesar Rp.600.000/bulan.

Perempuan yang hidup dalam lingkaran budaya patriarki yang melahirkan relasi kuasa yang timpang, menyebabkan perempuan mengalami berbagai persoalan karena identitasnya sebagai perempuan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat negara. Dalam potret perempuan miskin di Papua, kita melihat tiga kelompok utama perempuan, yakni; perempuan nelayan, petani dan pekerja informal.

1. Perempuan Nelayan

Perempuan di sektor ini bekerja sebagai nelayan pencari ikan, kerang dan pengolah hasil laut. Penghasilan yang dihasilkan Rp. 200.000-500.000/hari. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk biaya sekolah dan kuliah anak, biaya listrik, biaya makan dan minum, membeli sayur, ikan, sabun dan air bersih. Penghasilan yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, misalnya pengeluaran yang tidak terduga

2. Perempuan Petani

Perempuan di sektor ini memiliki penghasilan sebesar Rp.100.000-300.000/hari. Penghasilan yang didapatkan

oleh perempuan digunakan untuk bayar listrik, internet, biaya sekolah anak, perpuluhan perbulan, makan/ minum, beli minyak goreng dan minyak tanah, gula dan teh. Penghasilan yang diperoleh perempuan, kadang di cukup-cukupkan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.

3. Perempuan di Sektor Informal

Perempuan di sektor ini memiliki penghasilan Rp. 50.000-750.000/hari. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk membeli makanan, pinang, uang transport, beli bedak, lipstick, bayar listrik, bayar air, kredit motor dan beli bahan bakar kendaraan. Penghasilan yang diperoleh perempuan di sektor ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski memiliki penghasilan dari keluarga yang lain.

Perempuan dan kebutuhan rumah tangganya

Pendapatan hasil kerja sendiri maupun dari keluarga yang lain, hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran listrik, beli minyak goreng, minyak tanah, membayar transportasi/taksi online, membayar sewa kamar, membeli benang untuk menjahit dan tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan yang lain karena penghasilan yang didapatkan lebih sedikit dibanding biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tua karena warisan hanya diturunkan pada anak laki-laki. Hal ini merupakan aturan adat yang berlaku tidak adil bagi perempuan. Ada juga yang memiliki aset berupa motor, panci peninggalan Belanda, tanah $\frac{1}{4}$ hektar, rumah dengan kepemilikan pribadi, dan beberapa aset dengan



kepemilikan bersama seperti sertifikat tanah dan rumah. Selain itu, ada juga yang sama sekali tidak memiliki warisan dan aset.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga:

Dalam situasi miskin dan beban tanggung jawab domestik, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Perempuan yang bekerja di sektor informal, kerap kali mendapatkan kekerasan berupa stigma/pelabelan, diskriminasi, dihina, di kucilkan, mengalami kekerasan verbal bahkan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena sebagai perempuan, berpendidikan rendah dan sebagai perempuan miskin. Situasi diatas, membuat perempuan marah, sedih, kecewa, sakit hati, merasa diasingkan dan bahkan ada yang berfikir untuk mengakhiri kehidupan dengan bunuh diri.

Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Dalam konteks rapat pengambilan keputusan, ada perempuan yang diundang dalam musyawarah kampung, sosialisasi program pemerintah, dan pelatihan membuat kue.

Namun sebagian besar perempuan mengatakan tidak diundang dan tidak dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan, hanya laki-laki/kepala keluarga yang diundang. Namun beberapa perempuan hadir dalam rapat tersebut mewakili ayah atau suami.

Perempuan juga diundang dalam aktivitas sosial dan keagamaan di antaranya ibadah, kedukaan dan acara nikah. Begitupun ketika ada rapat adat, yang diundang adalah laki-laki/suami karena menurut mereka acara tersebut adalah acara sakral yang sehingga yang boleh datang adalah laki-laki. Di tengah situasi miskin dan ketimpangan ekonomi yang dihadapi, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti diskriminasi, dihina dan dikucilkan. Selain itu, ada juga perempuan yang mengalami penghinaan, dikucilkan dan berkonflik dengan masyarakat yang lain karena berebut tempat untuk berjualan. Yang ia rasakan atas perlakuan tersebut; sedih, menanggung, marah, benci kepada orang tertentu tetapi beberapa sikap yang ditunjukkan; mencoba untuk bangun memerangi ketidakberdayaan,

Perempuan dan negara

Perempuan mengetahui mengenai akses informasi terhadap program bantuan pemerintah, namun tidak dapat mengakses semuanya. Perempuan hanya dapat mengakses program pemerintah berupa Kartu Merah Putih, BPJS Kesehatan, KIS, BLT, PIP dan dana bos. Meskipun harus mengurus dokumen yang lain sebagai syarat untuk mendapat bantuan. Persoalan lain yang dihadapi oleh perempuan, sulit mendapatkan akses untuk membuat sertifikat tanah karena selain biayanya mahal juga sistemnya online.

Perempuan dapat mengakses pelayanan administrasi negara, berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah, SKTM, Kartu merah putih, akte kelahiran, BLSA, KTA. Namun mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah desa.

Akses ke sumberdaya alam

Perempuan kesulitan mengakses laut karena diusir dan dilarang oleh aparat. Padahal laut merupakan sumber mata pencaharian utama perempuan untuk mendapatkan ikan dan kerang untuk dijual di pasar terdekat. Selain itu, perempuan tidak lagi mendapatkan akses untuk memperoleh manfaat dari hutan karena masuknya perkebunan kelapa sawit yang mengakibatkan hutan menjadi tandus dan kering. Persoalan lain yang dihadapi oleh perempuan adalah banjir karena bendungan di Koya dan harus membeli kayu dari Kota Jayapura padahal perempuan memiliki kekayaan alam berupa Lembah Foja dan Lereng Cyclop. Sayangnya memang masyarakat tidak dapat mengakses dan memanfaatkannya karena telah dikuasai perusahaan dan pemerintah yang tidak bertanggungjawab dan mengabaikan kepentingan perempuan.



Usulan perubahan yang diinginkan perempuan:

Perempuan ingin agar pemerintah;

- memberikan akses terhadap perempuan untuk melaut,
- menyediakan tempat/lokasi yang layak di pasar untuk menjual ikan dan kerang,
- memberikan bantuan alat tangkap, berupa perahu untuk memudahkan perempuan melaut.
- memberikan ganti rugi kepada masyarakat karena tanah telah dikuasai selama 30 tahun oleh PTPN,
- membongkar bendungan di Koya, pemerintah berhenti mengambil kekayaan di tanah papua, jadikan perempuan Papua menjadi tuan di tanah dan alam sendiri,
- membuat regulasi yang melindungi Hak perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA,
- meninjau kembali kebijakan untuk hutan lindung yang melindungi perempuan terhadap hutan papua,
- melibatkan perempuan dalam rapat pengambilan keputusan dan merumuskan program yang berpihak pada kepentingan perempuan papua.
- mengubah sistem yang sulit diakses seluruh masyarakat untuk mendapat program bantuan pemerintah,
- membuat regulasi yang mengatur tentang hak dan kepentingan perempuan,
- membuat sistem yang lebih mudah untuk pengurusan sertifikat tanah,
- memberi bantuan dana bagi Usaha skala Mikro,
- memberikan akses bantuan pendidikan dan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak dapat mengakses pendidikan,
- mensosialisasikan program bantuan pemerintah kepada seluruh masyarakat.

[A]

Konsultasi di Purwokerto

14 November 2021



KONSULTASI perempuan di Purwokerto tanggal 14 November 2021 dihadiri oleh 16 peserta dari 8 wilayah di Jawa Tengah, yaitu dari Banyumas, Brebes, Cilacap, Kebumen, Pemalang, Pekalongan, Salatiga, Kedung Ombo, dan Yogyakarta. Mereka sebagian besar terdiri dari perempuan tani, buruh tani, perempuan nelayan, penyandang disabilitas, buruh batik, guru honorer, dan lainnya.

Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya

Secara umum para perempuan yang hadir dalam konsultasi mengatakan bahwa mereka bangun tidur sekitar jam 3.30 pagi. Kegiatan mereka diawali dengan sholat subuh dan lalu melakukan kerja-kerja yang belum selesai di malam sebelumnya. Setelah itu mereka masak, mencuci dan membersihkan rumah, dan kemudian pergi bekerja baik ke kantor, maupun ada yang mencari rumput untuk makanan sapi, kerja di sawah, cari daun pisang dan daun singkong untuk dijual ke pasar, memberi makan ayam, memilih ikan dan menjualnya di pasar, bekerja di ladang padi, menjadi tukang ojek panggilan dan menderas. Sore hari masak untuk makan malam, mengurus anak, dan pergi tidur sekitar jam 9 malam.

Selain mengurus anak sendiri, ada juga perempuan yang mengurus adik dan orang tua. Perempuan hampir semua tidak melakukan istirahat/tidur siang. Ada juga yang menggunakan waktu sore untuk melakukan bisnis online.

Pendapatan para perempuan tersebut beragam, tergantung pada pekerjaannya.

- Ada yang berpenghasilan Rp 5 juta/bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan kesehatan. Namun pas-pasan apabila harus melakukan perbaikan rumah atau untuk membeli rumah.
- Seorang perempuan yang menjadi korban pengrusakan Waduk Kedungombo 40 tahun lalu, memperoleh penghasilan Rp 150.000/hari dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- Seorang perempuan difabel berpenghasilan Rp 200.000/bulan dari hasil penjualan online, dan penghasilan ini sangat tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup.
- Perempuan yang penghasilannya dari sektor pertanian memiliki penghasilan sebesar Rp. 35.000 di masa panen, yaitu dengan mengumpulkan sisa-sisa padi (*ngunu*). Bila tidak ada panen, maka tidak ada penghasilan. Penghasilan seperti ini hanya cukup untuk membeli makanan saja, tidak bisa untuk membeli barang lain, seperti baju misalnya. Penghasilan yang digunakan tidak dapat memenuhi



kebutuhan sandang dan papan, hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap hari, meskipun memperoleh penghasilan tambahan dari suami.

- Ada juga perempuan yang berjualan sayur hasil memetik dari kebunnya sendiri sehingga dapat berpenghasilan sekitar Rp 500.000/bulan, dan ditambah dengan pendapatan suami dari menderas sekitar Rp 70.000/hari. Penghasilan keluarga tersebut dirasakan cukup untuk makan, pakaian, pendidikan Anak.
- Perempuan yang penghasilannya dari hasil tangkapan laut, memperoleh antara Rp 20.000 - Rp 50.000/hari. Suami juga nelayan. Penghasilan keluarga tetap tidak cukup untuk membeli makanan dan pakaian, tidak bisa membayar BPJS, sering terlambat membayar listrik dan sering berhutang kepada ketua RT atau pada kelompok nelayannya. Membuat abon lele menjadikan penghasilan seorang perempuan sebesar Rp 50.000/hari. Penghasilan seperti ini sering tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk tetap harus membayar listrik dan biaya pendidikan anak.
- Seorang guru honorer mendapatkan gaji sebesar Rp 100.000/bulan, dan bisnis online yang dimilikinya bisa membantu untuk menambah penghasilan, demikian juga warung sayur yang dimiliki orang tuanya. Seorang guru PAUD mendapatkan penghasilan Rp 3,6 juta/bulan, yang hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan makan, jarang membeli pakaian, dan sulit untuk membayar listrik, dan sekolah anak.
- Seorang perempuan yang menjadi PRT berpenghasilan Rp 60.000/hari dan kemudian ditambah dengan penghasilan dari mengojek yang kadang-kadang paling banyak mendapatkan Rp 40.000/hari.



- Perempuan pemijat berpendapatan Rp 30.000/orang dan ditambah dengan berjualan barang rongsok yang seharusnya bisa mendapatkan Rp 15.000/hari. Anak-anaknya yang sudah bekerja di warung es dan restoran, dapat membantu untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, listrik dan air.
- Seorang buruh batik mendapatkan sekitar Rp 8.000 -20.000/hari, hanya cukup untuk makan secara sederhana, tidak bisa membeli pakaian, membayar listrik. Kadang-kadang anak yang sudah bekerja membantu untuk menutupi biaya lainnya.
- Perempuan pemilik warung, mendapatkan penghasilan sekitar Rp 25.000/hari, hanya untuk makan seadanya dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk memiayar air dan listrik.
- Perempuan yang bekerja di sektor informal memiliki penghasilan yang tidak menentu. Perempuan biasanya mendapat penghasilan sekitar Rp.35.000-150.000/hari. Kadang mereka tidak mendapatkan penghasilan apapun.

Penghasilan yang diperoleh, digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, membayar listrik, jajan anak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan. Selain itu, perempuan di sektor ini bangun pagi pada pukul 04.00 dan tidur di malam hari pada pukul 23.00. Ketika bangun pagi, perempuan melakukan aktivitas memasak, mencuci, menyiram tanaman, mandi, membersihkan rumah, mengurus anak dan suami, terkadang mereka tidak memiliki waktu untuk istirahat di siang hari.

- Perempuan penyandang disabilitas, memiliki penghasilan yang tidak menentu. Setiap bulannya, penghasilan yang didapatkan berkisar Rp.200.000 dan biasanya tidak ada sama sekali. Penghasilan yang didapatkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih kebutuhan sandang dan papan. Pakaian yang digunakan hanya pakaian bekas yang diberi oleh orang lain. Di tengah situasi kemiskinan yang dialami, perempuan bangun lebih pagi untuk beraktivitas untuk mengurus



urusan rumah tangga/domestic. Biasanya perempuan bangun di pagi hari pada pukul 05.00 untuk memasak, membersihkan kamar dan rumah, mencuci dan mandi.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik. Perempuan mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga maupun di ruang publik karena berbagai alasan, termasuk karena situasinya yang miskin, penyandang disabilitas maupun karena seksualitasnya. Perempuan beranak banyak sering dilecehkan dengan anggapan tidak mampu memberi makan kepada anaknya. Memperjuangkan hak atas tanah pun sering dijadikan bahan pelecehan ‘miskin tapi sibuk’ sehingga mengecilkan hati.

Sebagai perempuan penyandang disabilitas sering mendapatkan ejekan, kekerasan bahkan pemukulan, sering juga dianggap bodoh. Misalnya, kaki yang besar pun sering mendapatkan ejekan dari teman sekolah, sehingga tidak mau sekolah lagi dan tidak memiliki teman. Ada perempuan penyandang disabilitas yang diterlantarkan oleh suami dengan alasan “menyusahkan” keluarga, sering dibentak oleh saudara dan mengalami pelecehan seksual. Perasaan ketika mendapat perlakuan kekerasan, merasa sedih, ingin melarikan diri dan pernah berpikir untuk melompat ke dalam sumur.

Kemiskinan juga merupakan sumber perundungan. Ada perempuan yang menjadi miskin akibat orang tua meninggal, dan kemudian diserahkan pada neneknya. Di sana dia diperlakukan sebagai pembantu dan harus membereskan rumah dan membantu di dapur. Ada yang dikucilkan karena miskin dan tidak boleh mendekati yang kaya.

Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Biasanya perempuan dilibatkan dalam kegiatan '*rewang*' yaitu kegiatan sosial desa apabila ada kegiatan seperti pemakaman, pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sebagainya; atau kegiatan seperti PKK dan Posyandu. Sementara untuk kegiatan yang sifatnya pengambilan keputusan seperti musrenbang atas musrendus.

Perempuan sebagai warga negara

Biasanya pelayanan administrasi negara bisa diperoleh oleh perempuan miskin seperti KTP dan Kartu keluarga. Namun tidak semua bisa secara mudah mengakses BPJS, kartu tani (hanya untuk laki-laki) maupun program bantuan pemerintah lainnya. Meski demikian terlihat berbagai persoalan lain dalam hal ini, misalnya desa, data yang masuk berbeda dengan data penerima bantuan/pelayanan negara. Dengan program-program bantuan pemerintah tidak diperoleh seperti PKH, BOS akibatnya kurang informasi kepada mereka maupun mengenai cara untuk mengksesnya.

Ada juga dana bantuan pemerintah tidak diterima oleh perempuan karena atas nama suami. Bantuan beras miskin dibagi merata, baik kaya maupun miskin mendapatkan. Dengan demikian bantuan bisa dikatakan tidak tepat sasaran.

Selain pelayanan administrasi negara, akses ke kebutuhan dasar yang seharusnya disediakan oleh negara, seperti kesehatan dan air bersih, sangat sulit untuk diperoleh.

Hilangnya akses ke sumberdaya alam dan sumber kehidupan
Penggusuran lahan menyebabkan harus pindah ke kota, berjualan di stasiun sambil menjadi tukang ojek ataupun buruh cuci pakaran.

Kegiatan untuk membangun sumber energi menyebabkan terjadi pencemaran yang menghancurkan sumber penghasilan warga. Selain penggusuran akibat kegiatan pembangunan, seperti perluasan permukiman, perubahan iklim pun mengakibatkan penggusuran akibat kenaikan permukaan air laut (rob) yang merendam sumber-sumber kehidupan seperti tambak.

Para penjemur batik di tepi pantai pun kehilangan tempat untuk menjemur batik maupun rumah yang kini terendam air. Selain itu pembatasan penangkapan ikan menyebabkan nelayan tidak boleh melaut ke wilayah kampung laut.

Akses perempuan dan persoalannya

Para perempuan kemudian mendiskusikan persoalan akses yang mereka hadapi. Hasil diskusinya adalah sebagai berikut:

- Kartu tani yang hanya untuk laki-laki. Perempuan juga perlu punya kartu tani karena sebagian besar perempuan lebih pandai bertransaksi dalam perdagangan.
- Mendapatkan informasi dan berpendapat. Perempuan harus diberikan keleluasaan hak dalam mengakses apa saja. Antara lain perempuan janda yang tidak memiliki kartu keluarga. Mereka perlu tercatat di desanya dan mendapatkan informasi berkaitan dengan hal-hal mengenai desa, program bantuan, dan lainnya.

Perlindungan terhadap perempuan: Perempuan sering mengalami pelecehan di depan publik. Perlu adanya bantuan agar perempuan terlindungi dan terbantu masalah kesehatannya terutama bagi mereka yang menyandang disabilitas.

- Keterlibatan perempuan di kampung: Tidak pernah ada kegiatan khusus yang membahas persoalan perempuan di kampung. Apabila ada musyawarah berkaitan dengan pengurusan perempuan diajak bermusyawarah tetapi tidak dilibatkan dalam diskusi. Perempuan sebenarnya melakukan banyak hal di kampung, karena itu mereka banyak tahu. Karena itu perempuan harus diutamakan dan didengar pendapatnya oleh pengurus desa juga yang lain. RT atau RW perlu ada wadah untuk menyampaikan aspirasi para perempuan.



Perubahan yang diinginkan perempuan

- Perempuan nelayan membutuhkan alat penangkap ikan karena tidak mampu membeli jaring. Kalau memiliki jaring, bisa memperoleh ikan besar. Juga dibutuhkan memperluas ijin nelayan. Bantuan nelayan itu perlu diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu.
- Perempuan yang mengunyu, ingin mendapatkan lahan untuk bertani sehingga tidak perlu lagi mengumpulkan sisa-sisa padi panen.
- Banyak bantuan sosial yang salah sasaran. Harusnya diatur dengan baik sehingga rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan, bisa mendapatkan. Perempuan perlu dilibatkan untuk mengatur hal ini agar menjadi lebih lancar. Perlu ada bantuan yang berbentuk modal bukan hanya pemberian. Bantuan untuk penyandang disabilitas perlu disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Bantuan perbaikan rumah dengan syarat memiliki tanah sendiri, sebenarnya mempersulit. Persyaratan seharusnya dipermudah, misalnya boleh di tanah yang menumpang, bukan di atas tanah milik sendiri.
- Guru honorer harusnya dihormati. Tuntutan kepada merekabanyak sekali, tetapi gaji tidak manusiawi karena sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Pelibatan perempuan seharusnya tidak saja yang bersifat untuk perayaan/upacara, teaapi jaga dalam hal-hal yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
- Perlu ada perda yang responsif gender.
- Perusahaan yang merusak lingkungan dan mencemari air agar segera dibubarkan oleh pemerintah.



Konsultasi di Makassar

15 November 2021



KONSULTASI di Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021, dihadiri oleh 30 perempuan. Mereka adalah nelayan tradisional perempuan pesisir, buruh tani yang melakukan aktivitas sebagai pencari kerang dan pengolah hasil tangkapan laut, pembuat kripik pisang, juru parkir, buruh migran, buruh industri, penjual pakaian, penjual gorengan, dan sebagai staf di organisasi disabilitas dari berbagai daerah seperti Makassar, Takalar dan Jeneponto.

Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya
Pembagian kerja dan beban domestik yang dilekatkan pada perempuan menyebabkan perempuan memikul tanggung jawab kerja domestik yang lebih berat dalam rumah tangga. Mereka harus bangun pagi lebih awal pada pukul 04.30 dan tidur malam paling cepat 21.30.

Aktivitas yang dilakukan oleh mereka di pagi hari diawali dengan memasak, mencuci piring dan pakaian, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, menjaga cucu, menyapu, membersihkan dan mengurus anak. Setelah mengurus urusan domestik, mereka kemudian berangkat untuk bekerja di kebun, memetik pisang, dan mengurus ternak. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki waktu untuk istirahat di siang hari, kecuali tidur dimalam hari pada pukul 22.00 atau 23.00.

Mereka memiliki penghasilan sendiri dari kerja mereka di kebun/sawah, menjual ternak, mencari kerang, berjualan, sebagai staf maupun hasil dari parkir. Penghasilan yang didapatkan tidak menentu karena mayoritas dari mereka kerja harian tergantung dari hasil panen, hasil tangkapan, hasil jual dan hasil dari parkir di toko/wilayah publik lainnya. Pendapatan mereka sangat beragam, mulai dari

Rp.20.000 sampai Rp 300.000/hari. Selain itu, perempuan memperoleh penghasilan tambahan dari suami dan anak. Penghasilan yang didapatkan juga beragam, tergantung dari pekerjaannya. Misalnya dari penghasilan sebagai buruh bangunan sekitar Rp. 50.000 sampai Rp.100.000/hari. Apabila suami sebagai petani, penghasilan sekitar Rp.300.000/bulan.

Perempuan yang hidup dalam lingkaran budaya patriarki dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi karena identitas dirinya sebagai perempuan dalam rumah tangga dan komunitasnya, juga menghadapi persoalan yang muncul dari wilayah yang merupakan sumber penghasilan dan pendapatannya. Dalam potret perempuan miskin di Sulawesi Selatan, kita melihat tiga kelompok utama perempuan, yakni perempuan nelayan, petani dan pekerja informal.

Perempuan Nelayan

- Perempuan di sektor ini, bekerja sebagai pengolah udang dan ikan, nelayan, pencari kerang. Mereka tinggal di Kelurahan Tallo, Buloa, Cambaya dan Kaluku Bodoa. Penghasilan yang diperoleh perempuan di sektor ini sekitar Rp.40.000-100.000/hari, yang digunakan



membayar air, listrik, sekolah anak, bayar bank, membeli makanan (beras, sayur, ikan), dan pengeluaran tidak terduga lainnya (undangan pernikahan, aqiqah, melayat) dan lainnya.

Perempuan Petani

- Perempuan yang bekerja di sektor pertanian di Sulawesi Selatan merupakan petani, buruh tani dan pengolah hasil produksi pisang. Mereka tinggal di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Perempuan di sektor ini memiliki penghasilan yang beragam, sekitar Rp.20.000-100.000/ hari, digunakan untuk membeli makan, lauk dan pauk. Penghasilan yang didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak dapat menyekolahkan anak lebih tinggi karena terkendala dengan biaya, meskipun ada penghasilan tambahan yang diperoleh dari suami atau anak. Untuk menunjang pendapatan sehari-hari, perempuan memanfaatkan lahan yang tersisa, biasanya menanam di sela-sela pohon karet/tebu untuk menanam tanaman pangan.

Perempuan di Sektor Informal

- Perempuan di sektor ini bekerja sebagai juru parkir, buruh migran, buruh industri, penjual pakaian dan gorengan, miskin kota. Penghasilan yang didapatkan pada sektor ini sebesar Rp.100.000-300.000/hari. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, lauk-pauk, membayar listrik dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, misalnya pendidikan, kesehatan, dll.

Kekerasan dan Diskriminasi

Situasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, membuat perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Pernah dihina, tidak dianggap/diperhitungkan dan pernah mendapat caci-maki meski tidak mengetahui penyebabnya dan membuat perempuan merasa sedih, kecewa dan memilih untuk diam, menarik diri dan menghayal.

Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Dalam rapat pengambilan keputusan, perempuan tidak diundang dan dilibatkan oleh pemerintah. Perempuan kebanyakan terlibat dalam kegiatan sosial, berupa pesta perkawinan, kerja bakti, arisan, sunatan dan perempuan sebagai masyarakat adat biasanya terlibat dalam upacara adat, rapat adat dan kegiatan adat lainnya.

Kelas ekonomi mempengaruhi peran dan posisi keluarga dalam lingkungan masyarakat. Perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi hanya karena bentuk tubuhnya



yang kecil sebagai perempuan yang dianggap lemah dan tidak mengetahui apa-apa. Selain itu, mereka dihina, dijauhi, dikucilkan karena memiliki rumah yang kecil dianggap kumuh dan miskin.

Perempuan tanpa suami karena suaminya meninggal dunia, mengalami kekerasan psikis karena identitasnya sebagai janda. Ketika pulang malam, ia kerap kali mendapatkan stigma sebagai perempuan nakal, dikucilkan dari lingkungannya dan bahkan dijauhi. Perempuan disabilitas mengalami diskriminasi karena bentuk tubuhnya yang tidak “sempurna” sebagaimana masyarakat pada umumnya. Situasi tersebut membuat perempuan merasa sedih, kecewa dan memilih untuk diam, menarik diri dan menghayal.

Kemiskinan dan ketimpangan gender dan ekonomi perempuan

1. Akses ke program bantuan pemerintah.

- Perempuan dapat mengakses PKH, beras miskin, KIP dengan mengumpulkan KK dan KTP dan menyerahkan kepada Pemerintah Setempat. Ada juga perempuan yang dapat mengakses berupa dana BOS, bantuan pendidikan dan Kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun KIS tersebut tidak menanggung sepenuhnya biaya perawatan dan obat-obatan sehingga perempuan masih harus mengeluarkan biaya. Ada juga perempuan tidak memiliki akses untuk mendapatkan program bantuan pemerintah karena namanya tidak terdaftar di sistem. Saat ini juga sudah tidak lagi mendapatkan BPJS karena sudah tidak lagi bekerja, pernah di tanggung oleh perusahaan, setelah berhenti bekerja tidak lagi di tanggung.

2. Akses ke pelayanan administrasi Negara.

- Perempuan dapat mengakses pelayanan administrasi Negara, berupa hak atas kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat nikah, PBB, surat tanah dan SKTM meski terkadang perempuan harus mengeluarkan uang untuk memperolehnya.

3. Akses ke sumberdaya alam

- Perubahan yang terjadi mengenai akses ke sumberdaya alam, perempuan kesulitan untuk mengakses laut sebagai sumber kehidupan karena reklamasi pantai untuk pembangunan pelabuhan Makassar New Port (MNP). Jika akan melaut, aksesnya jauh, pengeluaran untuk membeli bahan bakar semakin besar sementara pendapatan/penghasilan mencari ikan semakin kurang. Pemerintah belum melakukan ganti rugi apapun setelah pembangunan MNP beroperasi sejak tahun 2017 sehingga Perempuan memilih berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarga.



- Selain itu, dulu perempuan memiliki tanah dan kebun yang dijadikan sebagai sumber ekonomi dan sumber pangan. Namun, masuknya PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) dan PT London Sumatera (PT.LONSUM) membuat perempuan kehilangan lahan produktifnya akibat perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. London Sumatera dan PT Perkebunan Nusantara XIV. Perempuan banyak beralih profesi sebagai buruh tani dan juga pegawai tidak tetap di wilayahnya. Lahan produktif yang diambil oleh perusahaan merupakan tanah adat dan sumber kehidupan yang sudah sejak turun temurun di manfaatkan sebagai sumber ekonomi dan sumber pangan. Perempuan juga kesulitan untuk mengakses air bersih karena sumber mata air yang berada di sekitar pemukiman warga telah di pasang PDAM dan telah masuk perusahaan air milik swasta.

Usulan perubahan yang diinginkan oleh perempuan:

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan terhadap pemerintah;

- Menghentikan pembangunan proyek pelabuhan MNP yang telah merugikan nelayan, termasuk perempuan,
- Segera segera memberi ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan sejak pembangunan pelabuhan mulai dibangun
- Memperhatikan akses dan ketersediaan air bersih di wilayah pesisir dan memperkuat komunitas perempuan untuk bergerak dan bersuara bersama.
- Segera mengembalikan lahan pertanian milik masyarakat

- Membuka peluang akses pendidikan gratis bagi masyarakat khususnya Perempuan
- Membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat yang miskin
- Perlindungan Hak bagi buruh
- Memperbaiki data kemiskinan yang ada di Sulawesi Selatan dengan membuat basis data terpadu
- Pemerintah memberikan ruang dan kebebasan perempuan dalam berpendapat untuk menyampaikan permasalahan yang dialami
- Pemerintah segera mengesahkan RUU PRT demi kesejahteraan PRT.
- Pemerintah mencabut UU Cipta Kerja yang merugikan perempuan.

[A]

Konsultasi di Ambon

18 November 2021



KONSULTASI di kota Ambon dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021, diikuti oleh 31 peserta. Mereka adalah buruh perkebunan, petani, perempuan nelayan, pedagang kaki lima dan penjual kelapa, jasa pijat, penjual kue/gorengan, sepatu, buah dan sembako, penjahit, usaha catering, pengelola paud, usaha salon, perempuan dari masyarakat terkena dampak PLTA. Peserta berasal dari dari Kota Ambon dan sekitarnya, serta dari kabupaten/kota lain seperti Maluku Tengah, Leitimur dan Seram Bagian Barat.

Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya

Pembagian kerja dan sosial gender yang berlaku di masyarakat, menjadikan perempuan memikul tanggung jawab kerja domestik yang berat dalam rumah tangga. Mereka harus bangun lebih pagi dari anggota keluarga lainnya. Perempuan nelayan harus bangun pukul 03.30 untuk melakukan aktivitas, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, menjemur pakaian, barulah di siang hari mereka melaut, menjual ikan. Tidur malam pukul 22.00 atau 23.00, sebelum istirahat mereka harus menyiapkan makan malam keluarga, membersihkan rumah, dan kerja domestik lainnya.

Begitu pun perempuan petani dan yang bekerja di sektor informal seperti tukang parut kelapa, jualan membuka warung dan ibu rumah tangga, tetap bangun lebih awal dan melakukan aktifitas mengurus rumah tangga terlebih dahulu. Mereka ada yang hanya tinggal dengan keluarga inti yaitu suami dan anak, namun ada juga yang tinggal bersama keponakan, ayah dan saudara, sehingga urusan rumah tangga bukan saja sekedar mengurus rumah tapi ditambah mengurus orang tua dan ponakan. Kebanyakan mereka tidak memiliki waktu untuk istirahat siang.

Mereka memiliki penghasilan yang beragam dan tidak menentu, tergantung jenis pekerjaan dan besarnya hasil produksi kebun/sawah, berjualan dan hasil menangkap ikan. Penghasilan yang didapatkan, sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 300.000/hari, ada juga yang memiliki penghasilan Rp. 1.000.000 sampai Rp.5.000.000/bulan. Selain itu, perempuan mendapatkan penghasilan tambahan yang diperoleh dari suami, anak, orang tua dan saudara. Penghasilan mereka juga beragam, misalnya Rp.14.000/hari, ada juga yang memiliki penghasilan Rp.100.000 sampai Rp. 300.000/hari.

Perempuan yang di lingkungan budaya patriarki yang melahirkan relasi kuasa, menimbulkan berbagai persoalan yang mereka hadapi karena identitasnya sebagai perempuan dalam rumah tangga, komunitas hingga level Negara. Dalam potret perempuan miskin di Maluku, kita melihat tiga kelompok utama perempuan, yakni perempuan nelayan, petani dan pekerja informal.



Perempuan Nelayan

- Perempuan di sektor ini bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan. Penghasilan yang didapatkan pada sektor ini adalah Rp.100.000-300.000/hari. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, beli beras, lauk pauk, obat, susu, hajatan keluarga/tetangga, bayar kredit. Penghasilan yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya misalnya pembayaran sekolah anak, pembayaran kredit dan sewa transportasi, meskipun ada penghasilan tambahan dari suami dan anak. Pendapatan setiap hari sangat bergantung pada penghasilan dari mencari dan menjual ikan.

Perempuan Petani

- Perempuan di sektor ini bekerja sebagai bertani dan berkebun. Penghasilan yang didapatkan sebesar Rp.30.000-200.000/hari. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk membeli bahan makanan, pulsa, pembayaran listrik, popok anak, susu, pendidikan anak, renovasi rumah, kredit motor, pembayaran BPJS Mandiri, uang duka dan hajatan. Penghasilan yang didapatkan sangat kecil dari pengeluaran, sehingga penghasilan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun ada penghasilan tambahan yang diperoleh dari suami, dan anak.

Perempuan di sektor pekerja informal

- Perempuan di sektor ini bekerja sebagai penjual kelapa, jasa pijit, dan pemandu acara, pedagang kaki lima, kader, penjual; kue/gorengan, sepatu, buah dan sembako, penjahit, pengusaha katering, pengelola paud, usaha salon. Penghasilan rata-rata yang diperoleh sebesar Rp.50.000-

300.000/hari yang digunakan untuk membayar listrik, cicilan, biaya sekolah anak, sumbangan hajatan/duka keluarga dan tetangga, pulsa untuk paket data anak yang sekolah online, biaya berobat, air, kebutuhan makanan dan perabot rumah tangga. Penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya. Beberapa diantara mereka juga mencicil/sewa tanah. Terkadang untuk kebutuhan makan keluarga tidak mencukupi karena harus membayar beberapa cicilan motor, tanah dan kredit lainnya.

- Penghasilan yang diperoleh keluarga, berasal dari hasil kerja perempuan sendiri, suami, anak, orang tua dan saudara. Penghasilan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pangan yang meliputi beras, sayur, lauk pauk, air, dll. Penghasilan yang diperoleh tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, beberapa diantara mereka juga memiliki cicilan/kredit tanah. Mayoritas dari mereka tidak mendapatkan warisan dari orang tua. Tapi, mereka memiliki aset seperti motor, telpon genggam, sertifikat tanah, tabungan dan rumah. Ada juga perempuan yang hanya memiliki aset berupa telpon genggam, lemari pendingin dan perabotan rumah tangga lainnya.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik. Situasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan melahirkan kerentanan perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Di antaranya difitnah oleh ipar sendiri dan tidak mengetahui penyebabnya, dikucilkan karena dianggap orang pegunungan (dibaca orang kampung), dimaki dan dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan pernah



dihina karena dianggap miskin dan tidak memiliki pendidikan. Selain itu, ada juga dari mereka yang aktif menyuarakan isu perdamaian, seringkali mengalami diskriminasi karena menjadi agen perdamaian di wilayahnya. Situasi tersebut, menciptakan rasa sedih, kecewa dan marah tapi perempuan tidak tahu harus berbuat apa.

Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Dalam rapat pengambilan keputusan perempuan tidak dilibatkan. Perempuan hanya terlibat pada kegiatan sosial yang dilakukan oleh tetangga/masyarakat seperti HUT RI, acara perkawinan, wisuda, makan patita, melayat, acara adat, hari besar keagamaan, sunatan massal dan cuci negeri. Ada juga perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang digagas oleh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang meliputi kegiatan sosialisasi, kerja bakti, bakti lingkungan, dll.

Situasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dialami oleh perempuan, turut mempengaruhi peran dan posisinya

dalam rumah tangga, lingkungan, komunitas hingga tingkat negara. Perempuan seringkali mendapatkan pelabelan negatif sebagai perempuan miskin, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain itu, mereka juga mengalami diskriminasi untuk mendapatkan akses ke dokter kandungan dan dokter ahli penyakit dalam.

Kemiskinan dan ketimpangan gender dan ekonomi perempuan

1. Akses ke program bantuan pemerintah

- Perempuan hanya mendapatkan PKH dan tidak mendapatkan BLT. Hal ini karena bagi masyarakat yang telah mendapatkan PKH, tidak lagi diperkenankan untuk mendapatkan BLT. Selain itu, perempuan kesulitan untuk mengakses program lainnya, misalnya Kartu Indonesia Pintar untuk Pendidikan, Kartu Indonesia Sehat karena menurut pemerintah tidak terdaftar di pusat, meski sudah mendaftarkan diri di pemerintahan setempat. Selain itu, mereka juga kesulitan mengakses program sertifikasi tanah (Prona). Sementara untuk mengurus sertifikat secara mandiri biayanya mahal dan mereka tidak memiliki biaya.

2. Akses ke pelayanan administrasi negara

- Perempuan dapat mengakses pelayanan administrasi negara, berupa KK, KTP, PBB, akte kelahiran karena untuk mendapatkannya relatif mudah. Ada juga yang tidak bisa mengakses buku nikah/akte nikah karena persyaratannya yang sulit, misalnya harus mendapatkan surat pengantar dari desa domisili dan juga berbayar.

3. Akses ke sumberdaya alam

- Pendapatan setiap hari sangat bergantung pada penghasilan dari penjualan ikan. Ketika musim hujan, kereatan masyarakat yang beraktivitas di laut sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena ombak yang tinggi, hujan badai dan ikan semakin sulit untuk didapatkan. Sementara, mereka tidak memiliki perahu milik sendiri yang memadai untuk menangkap ikan di laut yang lebih jauh. Meskipun mereka sudah pernah mengusulkan ke pemerintah desa untuk pengadaan perahu, namun tidak dihiraukan.
- Perempuan juga kesulitan untuk mengakses air bersih. Air yang digunakan setiap harinya hanya bersumber pada sumur. Jika musim kemarau, sumurnya kering dan jika musim hujan airnya keruh. Selain itu, mereka kesulitan mengakses air karena jarak tempuh antara pemukiman dan sumber air jauh, sementara tidak tersedia fasilitas untuk memudahkan akses masyarakat.



Perubahan yang diinginkan oleh perempuan

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan terhadap pemerintah;

- menyediakan air bersih, termasuk fasilitasnya berupa saluran air dan bak air.
- memindahkan BPJS Mandiri ke KIS agar tidak membebani perempuan membayar setiap bulannya.
- menyeleksi kembali data penerima program bantuan agar tepat sasaran.
- menjaga dan merawat perdamaian.
- membuat program dan atau kegiatan yang dapat memberdayakan perempuan,
- merumuskan kebijakan yang berpihak pada perempuan,
- melibatkan perempuan dalam rapat pengambilan keputusan,
- membuat koperasi yang dikelola masyarakat agar dapat membantu seluruh lapisan masyarakat.
- menyediakan pekerjaan dan upah yang layak bagi perempuan.
- membuat pengadaan alat tangkap bagi nelayan untuk menunjang perekonomian keluarga.

[A]

Konsultasi di Bengkulu

23 November 2021



KONSULTASI di Kota Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021, dihadiri oleh 26 perempuan. Mereka adalah buruh perkebunan, kelompok masyarakat yang melakukan konservasi di perbukitan Kayangan, pemetik teh di perkebunan teh, pedagang kaki lima, nelayan, PRT, koperasi perempuan dari berbagai daerah seperti Kota Bengkulu, Seluma, Seluma Selatan, Kaur, Selupu Rejang, Batu Rota, Kepayang, Pondok Kelapa, Batu Ampar dan Sidoraja.

1. Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya

Sesuai dengan pembagian kerja dan sosial gender yang berlaku, perempuan memikul tanggung jawab kerja domestik yang berat dalam rumah tangga. Mereka harus bangun lebih pagi dari anggota keluarga lainnya. Rata-rata mereka bangun pada jam 4 pagi dan tidur malam paling cepat pada jam 22.00.

Kegiatan mereka di pagi hari diawali dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga, menyiapkan anak yang akan pergi ke sekolah, menyiapkan bekal untuk pergi ke kebun, membersihkan rumah. Biasanya, mereka kemudian berangkat untuk bekerja di kebun, ladang, memetik teh, atau mengurus ternak. Di siang hari mereka kembali ke rumah untuk memasak, membersihkan rumah kembali, kemudian mengurus suami dan anak seperti menemani belajar dan mengerjakan tugas sekolah sampai malam hari. Ada juga yang merawat cucu dan keponakan. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat di siang hari, kecuali tidur di malam hari setelah jam 9 atau 10 malam. Mereka yang berjualan seperti rempeyek/ubi cabe, akan menyiapkan barang jualannya di sore/malam hari.

Beberapa perempuan memiliki pendapatan sendiri dari kerja mereka di ladang, kebun, beternak, menangkap ikan, maupun berjualan. Pendapatan ini tidak tetap karena merupakan kerja harian, tergantung panen maupun pembelinya. Pendapatan ini beragam, mulai sekitar Rp sebesar Rp 50.000 sampai Rp 250.000/hari.

Namun ada juga perempuan yang tidak berpenghasilan, dan hanya menunggu pemberian suami. Pendapatan suami yang diberikan ke rumah juga beragam, tergantung dari sumbernya, misalnya dari menira getah karet sekitar Rp 700.000 - 1.000.000/bulan. Bila suami adalah buruh tani, penghasilan sekitar Rp 150.000/hari.

Perempuan yang hidup dalam kungkungan budaya patriarki dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi baik karena dirinya sebagai perempuan dalam rumah tangga dan komunitasnya, juga menghadapi persoalan yang muncul dari wilayah yang merupakan sumber penghasilan maupun pendapatannya. Dalam potret perempuan miskin di Bengkulu ini, ada tiga kelompok utama perempuan, yaitu perempuan petani, nelayan dan perempuan bekerja di sektor informal.

Perempuan tani.

Perempuan di sektor ini merupakan petani penggarap, produsen hasil hutan, petani sawah, kopi, dan sayur, dan buruh tani. Perempuan di sektor ini memiliki penghasilan antara Rp.60.000-Rp100.000 per hari. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan makan, membayar sekolah anak, kebutuhan air bersih. Penghasilan lain yang diperoleh dari suami dan anak sebagai

tambahan namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya membayar cicilan rumah, iuran BPJS, kredit rumah, kebutuhan sekolah anak, dan lainnya.

Perempuan Nelayan.

Perempuan yang bekerja di sektor nelayan di Bengkulu merupakan pencari kerang, penangkap ikan dengan melaut, pengelola hasil tangkapan dan mengeringkan ikan. Mereka tinggal di Bengkulu Tengah dan Kabupaten Saluma.

Besarnya pendapatan di sektor ini beragam, ada yang kecil sebesar Rp 50.000-70.000 per hari sampai berpendapatan besar sekitar Rp 300.000/hari. Pendapatan tersebut diperuntukan untuk belanja harian seperti sandang, pangan, sewa rumah, transportasi, listrik, air, dan lainnya. Mereka yang berpenghasilan kecil menghabiskan pendapatannya untuk kebutuhan dasar, tidak ada alokasi untuk berobat, biaya sekolah anak, apalagi untuk membeli rumah. Sementara nelayan yang berpendapatan besar bisa mengalokasikan untuk membeli rumah, membiayai anak sekolah dan menabung.

Perempuan di Sektor Informal.

Perempuan di sektor ini bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pedagang pasar. Penghasilan yang didapatkan sekitar Rp.100.000/hari. Penghasilan tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak, membeli makan dan kebutuhan air bersih. Penghasilan lain yang diperoleh dari suami dan anak. Meski demikian penghasil tersebut

tidak dapat membiayai kebutuhan lain misalnya berobat ke dokter/rumah sakit karena biayanya yang terlalu mahal.

2. Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga, baik berasal dari pendapatan hasil kerja perempuan sendiri maupun yang berasal dari pendapatan suami, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, air bersih dan biaya sekolah anak, tetapi tidak bisa untuk berobat ke dokter, mencicil biaya sekolah anak ataupun untuk membeli rumah. Kadang, membeli pakaian pun tidak mencukupi.

Sebagian besar perempuan tidak memiliki properti atau memiliki barang atas nama pribadi. Kebanyakan milik seperti tanah dan motor, adalah atas nama suami. Namun ada juga perempuan yang memiliki rumah dan



motor atas nama pribadinya. Kalaupun ada perempuan yang memiliki tanah atau rumah atas nama pribadi, biasanya karena hibah warisan.

Ada perempuan yang bisa memiliki akses untuk meminjam uang ke bank atau koperasi untuk membeli bibit dan pupuk, atau motor, magpun perabotan rumah tangga, tetapi tidak memiliki akses untuk membeli rumah secara kredit, terutama karena pendapatannya yang kecil. Namun ada juga perempuan yang sama sekali tidak mempunyai akses untuk membiayai kebutuhan produksinya, seperti misalnya yang dialami perempuan petani sayur. Untuk perempuan petani kopi, apabila mereka bergabung dalam kelompok tani, mereka bisa mendapatkan bibit dan pupuk.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik.

Selain kesulitan ekonomi, perempuan pun tidak sedikit mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perempuan yang bercerai dengan suami, sering mendapatkan penghinaan, dicaci maki serta dikucilkan oleh orang lain dan keluarga sendiri. Ada pengalaman perempuan yang pernah mengalami KDRT selama 3 tahun pertama pernikahan, juga disepelekan oleh mertua. Ada yang sering dipukuli suami sampai babak belur, dihina mertua dan kemudian ditinggal. Suami juga ada yang menuduh perempuan tidak bisa mengurus mertua atau kakak ipar. Para perempuan yang mengalami KDRT seperti ini biasanya hanya bisa menerima, tidak bisa berbuat apa-apa dan menangis.

3. Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Kebanyakan perempuan tidak diundang dalam kegiatan yang berupa rapat-rapat desa, sosialisasi program tertentu maupun musrembang. Perempuan kebanyakan terlibat dalam kegiatan yang sifatnya gotong royong seperti apabila ada pernikahan, upacara adat. Hanya suami yang biasanya diundang dalam rapat-rapat desa. Namun, perempuan yang menjadi anggota PKK, biasanya terlibat dalam rapat dan kegiatan PKK.

Situasi/status miskin berpengaruh terhadap posisi keluarga di dalam masyarakat. Ketika ekonomi keluarga masih stabil membiayai sekolah adik dan membantu kebutuhan ekonomi sanak saudara lain. Namun setelah ekonomi keluarga memburuk akibat suami sakit, tidak ada yang peduli dan ketika mau meminjam uang harus ada jaminan. Saat kondisi ekonomi keluarga masih sulit dan penghasilan masih sedikit, sering dipandang sebelah mata tidak dianggap dalam pertemanan dan malah direndahkan. Perasaan sedih dan sakit hati juga



menangis, menghadapi situasi tersebut karena tidak bisa melawan. Apalagi apabila ada anggota keluarga yang sakit dan harus pergi berobat dan tidak ada uang. Meminjam ke tetangga dan sanak-saudara, sering tidak diberikan, malah dicaci dengan anggapan tidak akan bisa membayar kembali.

Penampilan pun menjadi ukuran untuk peran dalam masyarakat. Seorang perempuan yang memiliki cacat wajah dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat karena dianggap tidak cocok tampil di muka umum, hanya cocok untuk kerja-kerja di belakang atau di dapur. Malah pernah ditolak pemerintah desa karena masalah kekurangan fisik tersebut. Seorang perempuan lain yang pernah mengalami kecelakaan sehingga menjadi penyandang disabilitas, mengalami perubahan perlakuan, sering mengalami penghinaan, kekerasan dan dikucilkan. Perasaan yang ada dalam menghadapi situasi ini adalah sedih dan merasa rendah diri, dan hanya bisa bersabar.

4. Perempuan dan negara

Akses ke program bantuan pemerintah:

- Banyak perempuan yang mengetahui program-program subsidi dan bantuan pemerintah, dan bisa mengaksesnya dengan mudah. Namun ada perempuan yang hanya memiliki BPJS dan tidak dapat mengakses program bantuan pemerintah karena tidak mendapatkan informasi dan tidak didata oleh kantor desa. Ada juga yang dapat mengakses program PKH dan KWT, namun tidak mudah karena sulit mengurus program tersebut. Sementara itu untuk mendapatkan

KWT yang hanya disediakan untuk anggota kelompoknya, tidak mudah untuk menjadi anggota kelompok apabila tidak ada yang mengajak. Ada juga yang bisa mendapatkan program-program pemerintah seperti KIS, PKH, KWT, BLT, mendapatkan KIS. Ada juga yang mengetahui program-program pemerintah, namun tidak mendapatkannya karena dianggap sudah mampu, tidak dekat dengan perangkat desa, ataupun merasa bahwa persyaratannya banyak, sulit dan lama.

Akses ke pelayanan administrasi negara

- Kebanyakan perempuan bisa mendapatkan KTP dan surat lain seperti Kartu keluarga secara mudah, apalagi kalau bisa membayar. SKTM tidak mudah untuk mendapatkan, demikian juga akte kelahiran karena tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, kecuali dekat dengan perangkat desa atau dengan bidan. Bagi mereka yang bertempat tinggal di wilayah terpencil, sulit untuk mendapatkan karena faktor jarak dan proses yang lama.



Akses ke sumberdaya alam

- Sejak adanya sebuah perusahaan kelapa sawit, penghasilan perempuan hilang karena hutan yang selama ini menjadi sumber pendapatan mereka, sumber pangan dan obat-obatan, hilang. Sebelumnya mereka bisa mendapatkan dengan mudah berbagai macam buah-buahan di hutan, namun sekarang sangat sulit untuk mendapatkan buah-buahan, harus menanam sendiri atau membeli. Tumbuhan seperti pakis yang mudah ditemukan dan merupakan salah satu sumber makanan, namun setelah adanya perusahaan tidak bisa lagi panen. Sebelumnya perempuan masih bisa menanam sayur karena pohon-pohon sawit masih rendah/kecil. Kini pohon-pohon sawit sudah tinggi, sehingga sulit menanam sayuran.
- Perubahan yang terjadi atas akses ke sumberdaya alam. Dulu kala terdapat tanah dan kebun di belakang rumah, namun sekarang karena sering terjadi abrasi yang menguras tanah atau kebun di sekitar rumah dan di dekat sungai, atau pantai. Dugaan warga karena terjadi perubahan fungsi lahan. Karenanya, mengembalikan fungsi lingkungan seperti semula, membuat pemecah ombak, dan penghijauan kembali kawasan pesisir.
- Pembangunan proyek energi PLTA Musi, pem bangunan tambang galian C dan tambak udang menyebabkan terjadi abrasi pantai dan berkurangnya ikan, menenggelamkan tanah, kebun sayuran, sawah dan pemukiman masyarakat. Sebelumnya para perempuan bisa menjemur ikan kering, tetapi semenjak terjadi abrasi, pantai menjadi hilang dan tidak ada tempat. Para lelaki juga tidak bisa mencari ikan di laut.

5. Perubahan yang diinginkan perempuan:

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan terhadap pemerintah;

- memberikan kemudahan dalam hal pengurusan administrasi kependudukan dan bantuan pemerintah dan tepat sasaran, serta transparan dalam menyampaikan informasi.
- menindak tegas perusahaan yang masuk dan merusak hutan perempuan,
- secara khusus memperhatikan perempuan, memudahkan akses bagi perempuan untuk mendapatkan bantuan, adanya transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah mengenai bantuan yang didistribusikan,
- melibatkan perempuan dalam rapat pengambilan keputusan.
- memberikan layanan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat untuk pengurusan administrasi kependudukan.
- bertanggungjawab untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah dirusak,
- sistem birokrasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang harus dipermudah,
- menyediakan lapangan kerja yang mudah diakses dan layak bagi perempuan,
- mengambil tindakan terhadap kondisi hilangnya tanah, kebun dan sawah akibat abrasi serta ancaman hilangnya tempat tinggal masyarakat.

[A]

Konsultasi di Tabanan

2 Desember 2021

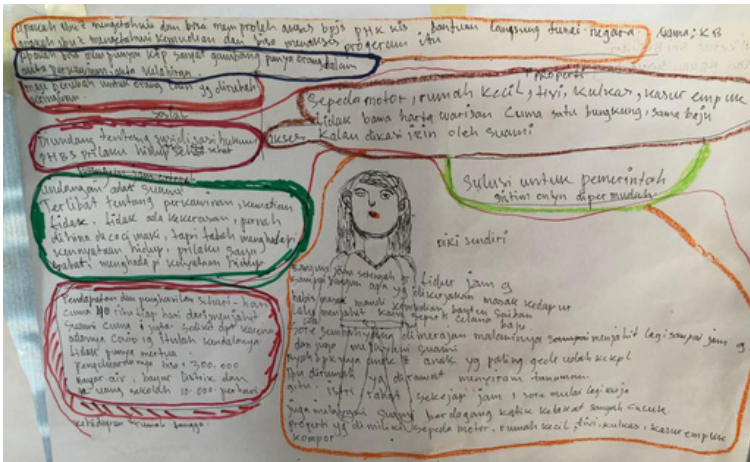


KONSULTASI Bali dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 di Desa Kerkeran, Tabanan, Bali dihadiri 29 perempuan. Mereka adalah pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, buruh tani, pengolah hasil laut, perajin alat upacara adat dan kemenyan, pengolah sampah desa dan kelompok masyarakat perempuan. Selain dari sekitar Desa Tabanan, perempuan-perempuan tersebut juga berasal dari kota Denpasar dan daerah Bangli.

1. Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya.

Perempuan petani biasanya bangun pada pukul 04.30 dan melakukan kegiatan rumah tangga, seperti; memasak, menyapu, mengepel, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan piring, mengurus anggota keluarga lain. Pada siang hari mereka beraktivitas di kebun dan menghaturkan sesajen. Mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat di siang hari, dan hanya memiliki waktu istirahat malam pada pukul 23.00 malam. Sementara perempuan nelayan yang pengolah hasil laut, bangun pada pukul 5.00 pagi dan tidur jam 22.00. Aktivitas yang dilakukan setiap pagi selain memasak, membersihkan rumah, mencuci, juga sembahyang, merawat suami, 2 anak dan mertua. Hampir tidak bisa istirahat siang. Sementara perempuan di sektor informal seperti pembuat dupa, usaha kuliner, pembuat banten, pedagang kecil, pengrajin jepit rambut, pembuat minyak Bali, bangun pada pukul 5.00 pagi dan tidur rata-rata pada jam 23.00. Setelah melakukan pekerjaan rumah di pagi hari, baru kemudian siap-siap bekerja mencari pendapatan.

Dalam konsultasi peserta terdiri dari 4 kelompok utama yakni perempuan petani, perempuan nelayan, perem-



puan sektor pariwisata, dan perempuan bekerja di sektor informal. Pendapatan yang diterima oleh keluarga yang berasal dari hasil kerja perempuan sendiri maupun dari suami, anak atau mertua, hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan, misalnya membeli beras, lauk-pauk, membeli air, listrik, pulsa telpon, dan lainnya. Beberapa di antara mereka harus berhutang di bank dengan bunga relatif tinggi untuk memenuhi kebutuhan papan dan sandang. Selain itu, mereka juga dibebankan untuk membayar hutang keluarga termasuk beberapa cicilan/kredit motor, bank, dll.

Sebagian perempuan tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, namun beberapa mereka mendapatkan aset/property dari hasil kerjanya dan suaminya berupa motor, tanah, rumah, sawah, kos-kosan, dan mobil. Beberapa mereka bisa menjualnya, namun beberapa dari mereka tidak bisa menggunakan aset yang dimiliki kecuali mendapat izin dari suami dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Perempuan petani.

Penghasilan kerja perempuan yang bertani rata-rata Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000/hari, penghasilan kerja nelayan pengolah hasil laut rata-rata per bulan sebesar Rp 2.000.000; sedangkan mereka yang bekerja di sektor informal pendapatannya sebesar Rp 500.000 – 1.000.000; perbulan. Mereka yang bekerja di sektor pariwisata pendapatan sebesar Rp 3.000.000 per bulan.

Perempuan petani dan buruh tani di sektor ini memiliki penghasilan yang tidak menentu, biasanya mereka mendapat penghasilan sekitar Rp.100.000/hari atau Rp.1.500.000/bulan. Penghasilan yang didapatkan sangat kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meski ada penghasilan tambahan dari suami. Penghasilan yang didapatkan hanya dapat memenuhi kebutuhan makan sehari-hari seperti beras, lauk-pauk dan tidak dapat memenuhi kebutuhan anak sekolah, termasuk pembayaran sekolah anak, sehingga mereka biasanya mencicil untuk membayar biaya sekolah.

Perempuan nelayan.

Perempuan nelayan yang mengolah hasil laut, memperoleh berkisar Rp 2.000.000 perbulan dan mendapat tambahan berasal dari suami sebesar Rp 3.000.000 per bulan.

Perempuan di sektor pariwisata.

Perempuan yang bekerja di sektor pariwisata menerima pendapatan sekitar Rp 3.000.000 per bulan. Juga mendapat pendapatan dari suami sebesar Rp 7.000.000 per bulan.

Perempuan di sektor informal.

Perempuan di sektor ini bekerja sebagai pedagang asong, pembuat dupa, pembuat banten, penjahir, penjual makanan, pengelolah sampah, pembuat sarana upacara, pedagang, pengrajin jepit rambut dan pembuat minyak bali. Penghasilan yang didapatkan sekitar Rp.500.000-1.000.000 per bulan. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli beras, keperluan dapur dan keperluan mandi dan mencuci, serta keperluan anak-anak, bayar air, beli paket internet untuk anak, untuk kegiatan sosial seperti undangan, upacara dan lainnya, dan bayar sekolah anak, membayar listrik dan biaya kesehatan. Penghasilan yang didapatkan relatif sangat rendah dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun perempuan mendapatkan penghasilan tambahan dari suami yang penghasilannya juga tidak menentu.



Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik. Situasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi perempuan, membuat kerentanan perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Perempuan dikucilkan, dihina, mengalami perlakuan diskriminatif oleh keluarga dan lingkungannya bahkan pernah mengalami kekerasan seksual karena dianggap miskin, tidak tahu apa-apa dan dianggap sebagai orang yang lemah. Situasi tersebut, membuat mereka merasa sedih, marah, kecewa, merasa ketakutan dan memilih untuk tidak bersosialisasi.

2. Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Ketika ada rapat pengambilan keputusan di kampung/desa, perempuan tidak pernah diundang dan dilibatkan di rapat desa. Yang diundang dan hadir dalam rapat-rapat tersebut adalah suami/kepala keluarga. Perempuan hanya terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya kematian, pesta perkawinan, kerja bakti dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

3. Perempuan sebagai warga negara

Akses ke program bantuan pemerintah:

- Perempuan mengetahui informasi adanya program bantuan Pemerintah seperti dana KUR, BOS, BPJS, pendidikan gratis, dll, namun tidak semua dari mereka mengetahui cara untuk mengakses program tersebut. Hal ini disebabkan karena persyaratan yang terlalu rumit dan biasanya menggunakan aplikasi internet yang tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya. Beberapa perempuan dapat mengakses program bantuan dari pemerintah, berupa Kartu Indonesia Sehat dan PKH meski harus mengikuti persyaratan yang ribet.



Akses ke pelayanan administrasi negara:

- Untuk akses ke pelayanan administrasi kependudukan, mayoritas perempuan bisa mendapatkan akses memperoleh KK, KTP, akte kelahiran, akte nikah. Tapi ada juga yang tidak dapat mengakses administrasi kependudukan, misalnya KTP karena menurut mereka persyaratan dan cara untuk mendapatkannya terbelit-belit.

4. Perubahan yang diinginkan perempuan:

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan terhadap pemerintah:

- memberikan akses yang mudah bagi masyarakat khususnya lansia untuk mendapatkan program bantuan, syarat untuk mendapat bantuan tidak sulit.
- memberikan akses masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki.
- mendesain penggunaan aplikasi internet yang mudah digunakan sehingga bantuan mudah didapat.

[A]

Konsultasi di Prapat

4 Desember 2021



KONSULTASI wilayah di Prapat, Sumatera Utara, dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 dihadiri oleh 26 perempuan. Mereka adalah petani, guru SD, PNS dan ibu rumah tangga yang melakukan aktivitas bertani, berjualan dan mengajar dari berbagai desa-desa di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, serta kabupaten tetangga lainnya seperti Deli Serdang dan Langkat.

1. Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya

Dalam rumah tangga, perempuan diberi tanggung jawab domestik, sehingga beban kerja dan tanggung jawab perempuan lebih berat. Mereka bangun pada rata-rata pada pukul 04.00 dan tidur malam paling cepat pada pukul 22.00. Mereka memulai aktifitas di pagi hari dengan memasak, mencuci, mengepel, menyetrika, menyapu, mengurus anak, mengurus cucu dan suami, serta memberi babi makan. Setelah mengurus rumah tangga, mereka melakukan aktivitas di kebun/sawah, berjualan dan mengajar. Setelah beraktivitas di luar rumah, perempuan kembali ke rumah untuk memberi makan orang tua yang lagi sakit, sehingga banyak perempuan yang tidak memiliki waktu untuk istirahat di siang hari.

Perempuan bekerja di sektor pertanian, pendidikan dan pekerja informal mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Ada yang tetap setiap bulan di sektor pendidikan, namun ada yang tidak tetap seperti petani dan pedagang yang menerima pendapatan sesuai hasil panen dan penjualan harian. Pekerja di sektor pendidikan mendapatkan hasil sekitar Rp 1.200.000 – 3.000.000; Perempuan petani; kebun/sawah sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000 per minggu. Sementara mereka yang beker-

ja di sektor informal memiliki penghasilan sekitar Rp. 1.000.000 per bulan. Selain itu, keluarga juga memiliki penghasilan dari suami dan atau anak, jumlahnya juga beragam dan tidak menentu sekitar Rp.60.000 sampai Rp.200.000 per hari.

Perempuan yang hidup dalam lingkaran budaya yang patriarki, diperhadapkan dengan berbagai persoalan karena identitasnya sebagai perempuan dalam rumah tangga dan komunitasnya, juga menghadapi persoalan yang muncul dari wilayah yang merupakan sumber penghasilan dan pendapatannya. Dalam potret perempuan miskin di Sumatera Utara, ada dua kelompok utama perempuan, yakni perempuan petani, perempuan di sektor pendidikan, dan perempuan pekerja informal.

Perempuan petani.

- Perempuan yang bekerja di sektor pertanian di Sumatera Utara merupakan petani yang tinggal di Janji Maria, Natinggir, Hutaginjang, Parongil, Nagasaribu, Aek Raja dan Pandingan.



- Perempuan di sektor ini memiliki penghasilan yang beragam, tergantung jenis tanaman yang di produksi dan besaran harga di pasar. Biasanya penghasilan mereka, sebesar Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000/minggu. Penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun penghasilan juga didapatkan dari suami. Penghasilan yang didapatkan hanya dapat membeli makanan, bayar listrik, transport ke gereja, beli gas, bensin, uang sekolah, beli pulsa dan beli pupuk dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang dan papan. Misalnya kebutuhan mereka untuk berobat dan akses pendidikan yang lebih tinggi.

Perempuan di sektor pendidikan.

- Perempuan di sektor ini memiliki penghasilan tetap sebesar Rp 1.200.000-3.000.000 per bulan. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, pendapatan juga bisa untuk membeli kosmetik, paket internet, listrik, obat-obatan, bayar sekolah anak dan biaya tidak terduga lainnya seperti ke pesta, arisan dan biaya pribadi lainnya. Di samping itu mereka juga memiliki tambahan penghasilan dari bertani dan dagang online, sehingga pengeluarannya juga digunakan untuk membeli pupuk. Penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Perempuan di sektor informal.

- Perempuan di sektor ini bekerja sebagai pedagang. Penghasilan yang didapatkan sekitar Rp 1.500.000-2.000.000; per bulan. Selain sebagai pedagang juga

ada tambahan pendapatan dari hasil bertani sebesar Rp 400.000 per dua minggu, juga pendapatan suami sebesar Rp 60.000 per hari. Pendapatan tersebut digunakan untuk selain membeli kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk biaya pendidikan, pesta, membeli pulsa, baju, membayar arisan, membayar kredit, membayar angsuran bank, membeli kosmetik, dan biaya persembahan. Besarnya pengeluaran dirasakan tidak cukup bagi pekerja di sektor ini.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga, yang berasal dari hasil kerja perempuan maupun hasil kerja dari anggota keluarga yang lain, hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kecuali mereka yang bekerja di sektor pendidikan, mengaku cukup untuk memenuhi pengeluaran. Mayoritas perempuan ini tidak mendapatkan warisan dari orang tua. Mereka memiliki aset, berupa motor, telpon genggam, tanah, sawah, rumah. Ada juga yang tidak memiliki aset sama sekali, rumah yang masih mengontrak dan masih menggunakan transportasi online.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik.

Perempuan mengalami diskriminasi dalam rumah tangga karena beberapa orang tua lebih mengutamakan anak laki-lakinya sekolah tinggi daripada anak perempuan. Berdampak pada akses pada pekerjaan yang layak yang menyebabkan rendahnya pendapatan. Sistem warisan pun demikian, anak perempuan (boru) tidak mendapatkan warisan sehingga tidak memiliki harta dan properti lain yang cukup untuk menopang kehidupannya sementara sekolah pun rendah.

2. Perempuan dalam kehidupan sosialnya

Dalam rapat pengambil keputusan, perempuan tidak diundang dan tidak dilibatkan. Pemerintah cenderung pilih kasih dengan tidak memprioritaskan warga pendatang, mengukur dari segi usia, dan suku. Selain itu, perempuan adat yang tidak dilibatkan karena memiliki batasan dari aturan adat untuk terlibat dalam kegiatan tertentu.

Perempuan kebanyakan terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya gotong royong, pesta perkawinan, arisan mar-ga, PKK, kelompok tani dan kelahiran. Sebagian kecil perempuan terlibat di rapat pengambil keputusan, meski pendapat dan suaranya tidak di dengar oleh pemerintah. Perempuan yang bertentangan dengan PT. TPL juga tidak diundang dan dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di tingkat kampung, yang sangat berbeda dengan mereka yang mendukung yang diberi akses ke segala hal termasuk segala bentuk subsidi pemerintah.

Di tengah kemiskinan yang dihadapi, mempengaruhi peran dan posisi keluarga dalam lingkungan sosial, perempuan seringkali mengalami diskriminasi dan intimidasi karena dianggap miskin, juga apalagi kalau melawan perusahaan dan pemerintah. Bahkan kecantikan pun juga diukur oleh masyarakat pada umumnya berdasarkan bentuk dan ukuran badan, warna kulit, dan lainnya. Perempuan yang berstatus sebagai ibu tunggal jarang dimintai pendapatnya karena dianggap tidak mengetahui tentang sejarah kampung dan sejarah tanah.



3. Perempuan sebagai warga negara

Akses ke program bantuan pemerintah:

- Perempuan dapat mengakses program bantuan pemerintah berupa PKH, Bansos, BLT dan vaksin. Dari beberapa bantuan tersebut, yang mudah diakses hanya vaksin, karena wajib dilakukan menurut pemerintah dan syaratnya tidak banyak. Sangat berbeda dengan bantuan lainnya yang harus menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan memiliki buku rekening bank. Ada juga perempuan yang mengetahui bantuan tersebut namun tidak memiliki akses untuk mendapatkannya karena menurut pemerintah desa, daftar nama dari pemerintah pusat sehingga banyak yang tidak terdaftar.

Akses ke pelayanan administrasi negara:

- Kebanyakan perempuan relatif mudah untuk mendapatkan administrasi kependudukan. Misalnya,

KTP, KK, kartu nikah, akte kelahiran, meskipun ada di antara mereka yang harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Yang sulit diakses perempuan adalah hak untuk mendapatkan sertifikat tanah. Selain biayanya mahal, pengurusannya juga sulit.

Akses ke sumberdaya alam

- Sejak masuknya PT. Toba Pulp Lestari (PT.TPL) sumber ekonomi dan sumber pangan perempuan hilang, demikian juga akses dan kontrol terhadap tanah adat. Masuknya PT. TPL di wilayah adat melalui izin pemerintah, mengakibatkan hilangnya hutan adat yang biasanya dimanfaatkan untuk memperoleh madu, kayu alam, obat-obatan, hewan hutan, dan lainnya.
- Selain itu perempuan juga kesulitan untuk mengakses air bersih. Hal ini disebabkan selain masuknya PT. TPL juga diakibatkan karena adanya sebuah perusahaan air minum yang sudah mulai membangun portal yang tidak jauh dari sumber mata air. Perempuan yang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dari PT.TPL kerap kali diintimidasi dan diancam oleh aparat pemerintah, masyarakat yang mendukung perusahaan dan beberapa orang yang disuruh oleh pihak perusahaan.
- Perempuan yang saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga, pernah memiliki ladang meski tidak besar, namun saat ini sudah tidak ada lagi karena telah dibangun Islamic Centre tanpa ada pemberitahuan dan ganti rugi yang diberikan.

4. Perubahan yang diinginkan perempuan:

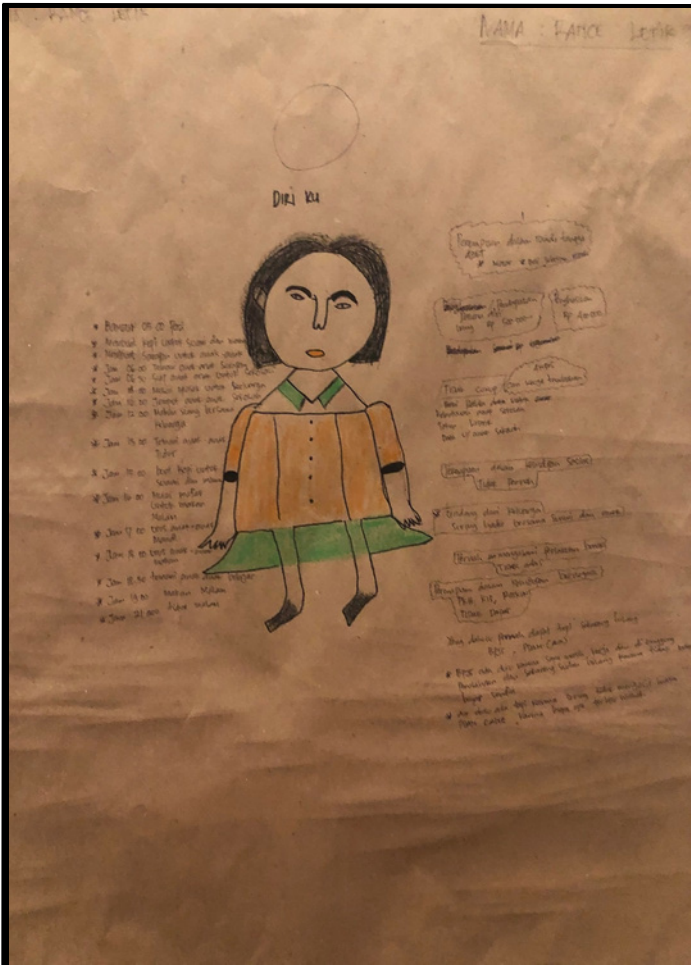
Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan, adalah pemerintah;

- mencabut izin PT.TPL dan segera mengembalikan tanah adat masyarakat,
- mengakui wilayah masyarakat dan hutan adat,
- bertanggung jawab atas rusaknya tanah adat akibat aktivitas PT.TPL,
- melibatkan perempuan dalam rapat pengambilan keputusan,
- melakukan perbaikan data untuk daftar nama masyarakat yang layak mendapatkan bantuan,
- menyusun peraturan daerah tentang perlindungan petani,
- memastikan akses dan ketersediaan air bersih bagi perempuan,
- memberikan lowongan pekerjaan bagi perempuan yang mudah diakses dan layak bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan,
- memudahkan akses untuk memperoleh bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat. [A]



Konsultasi di Kupang

6 Desember 2021



KONSULTASI di Kota Kupang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022, diikuti oleh 26 perempuan dari Kupang dan desa/kelurahan sekitarnya, yaitu Nunbau, Silumang, Belo, Oesapa, Kolhua, Pasir Panjang, Fatulali, Kelapa Lima, Bakunase dan Tabun. Mereka adalah perempuan nelayan, petani, ibu rumah tangga, penenun tradisional, buruh produsen tuak tradisional, pemulung, pencuci pakaian, buruh tani, pedagang kaki lima, tukang parkir dan pengemudi ojek online.

1. Perempuan, kerja dan kebutuhannya

Perempuan memikul tanggung jawab yang berat dalam rumah tangga sebagaimana pembagian kerja dan sosial gender yang berlaku. Perempuan nelayan yang pergi melaut biasanya berangkat pada jam 3.00. Diawali dengan menyiapkan makan untuk anak-anak dan keluarga, lalu pergi melaut sampai jam 14.00. Istirahat sejenak selama 2 jam, lalu masak, dan berangkat lagi ke laut jam 17.00 dan kembali pada pukul 20.00. Sementara perempuan nelayan yang suaminya melaut juga harus menyiapkan kebutuhan melaut suami seperti menyiapkan umpan dan membeli kotak pendingin (coolbox) di pasar, lalu menyiapkan makan keluarga, pakaian anak sekolah, dan menyiapkan makanan untuk suami pulang melaut, menjemput suami di pantai dan menjual ikan di pantai. Di samping itu ada perempuan yang juga harus membuat kue untuk jualan sebagai tambahan penghasilan, lalu menyiapkan perbekalan suami lagi yang akan melaut pada pukul 14.30, lalu membantu anak-anak mengaji, cuci pakaian, merapihkan rumah, mengepel, menyapu, melipat pakaian hingga pukul 23.00. Sementara perempuan petani biasanya bangun sekitar jam 4.00

untuk menyiapkan makanan, mencuci pakaian, memandikan dan mengurus anak dan suami, lalu bersiap-siap ke sawah, kebun atau mengurus ternak.

Beberapa perempuan memiliki pendapatan sendiri untuk pekerjaan mereka sebagai nelayan, petani maupun perempuan yang bekerja di sektor informal. Namun mereka menerima pendapatan yang tidak menentu, seperti nelayan mendapatkan sesuai dengan hasil tangkapan, begitu pun pemulung, pengemudi ojek online, pencuci pakaian, pedagang kaki lima, dan tukang parkir. Rata-rata pendapatan petani sehari sebesar Rp.70.000-150.000 per hari, nelayan pencari sekitar Rp.150.000-Rp.200.000 per hari, sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan, sedangkan perempuan dari sektor informal memiliki rata-rata pendapatan Rp.50.000-100.000/hari per hari.

Perempuan yang hidup dalam kungkungan budaya patriarki dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi baik karena dirinya sebagai perempuan dalam rumah



tangga dan komunitasnya, juga menghadapi persoalan yang muncul dari wilayah yang merupakan sumber penghasilan maupun pendapatannya. Dalam potret perempuan miskin di Kupang ini, kita melihat tiga kelompok utama perempuan, yaitu perempuan petani, nelayan dan perempuan bekerja di sektor informal.

Sektor Pertanian.

- Perempuan yang bekerja di sektor ini adalah petani sayur, sawah, dan peternak dengan penghasilan sekitar 70.000-150.000 per bulan. Penghasilan digunakan untuk membeli kebutuhan harian seperti beras, minyak tanah, minyak kelapa, sayuran, ikan, bumbu dapur, membeli pupuk dan lainnya. Ada nelayan yang bisa menyisihkan sedikit pendapatannya untuk sekolah anak. Namun sebagian pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menutupi kekurangan pengeluaran, perempuan biasanya meminjam kepada sanak keluarga, dan ke koperasi atau menggadaikan barang yang ada.

Sektor Perikanan.

- Perempuan di sektor ini bekerja sebagai nelayan tradisional pergi melaut dengan penghasilan berkisar Rp 150.000-200.000; per hari, sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan setiap hari. Pendapatan ini dikeluarkan untuk kebutuhan membeli; beras, sayur, ikan, uang jajan anak, air, dll. Pendapatan juga diperoleh dari pekerjaan lain seperti; jualan kue dan pembuatan MOL (mikroorganisme lokal) kelapa, hasil pancing ikan kelompok. Berbagai persoalan yang dihadapi di sektor ini yang menyebabkan berkurang-

nya pendapatan nelayan diantaranya pembangunan pemecah ombak, pembangunan hotel yang menutup akses nelayan ke pantai/laut, penggunaan bom ikan yang merusakkan terumbu karang, dan pencemaran laut akibat sampah plastik pasca badai Seroja yang berdampak berkurangnya hasil laut sehingga nelayan harus berlayar lebih jauh untuk mendapatkan ikan sementara biaya bahan bakar perahu menjadi sangat mahal karena harus berlayar jauh.

Sektor pekerja informal

- Perempuan yang berkerja di sektor informal di Kupang adalah pemulung, pengemudi ojek online, PRT, buruh di kantor, penjaga toko, penunun tradisional, buruh produsen tuak tradisional, pencuci pakaian, pedagang kaki lima, dan tukang parkir. Pendapatan yang dihasilkan di sektor ini relatif sedikit dengan rata-rata Rp.20.000-100.000 per hari atau 750.000-1.500.000 per bulan. Penghasilan digunakan untuk membeli kebutuhan



sehari-hari seperti makan dan lainnya. Ada juga kebutuhan untuk biaya kumpul keluarga, kematian dalam keluarga, dan biaya sakit. Penghasilan tersebut tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, beberapa cara dilakukan oleh pekerja informal diantaranya melakukan pekerjaan bermacam-macam, atau bila masih kurang harus mengutang ke tetangga atau ke saudara.

- Kesulitan perempuan di sektor ini juga disebabkan oleh tidak adanya akses terhadap air bersih sehingga perempuan harus mengalokasikan pendapatannya untuk mendapatkan air.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga, baik berasal dari hasil kerja perempuan maupun berasal dari pendapatan suami hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan ada yang mengatakan tidak cukup, sehingga harus berhutang ke saudara, tetangga, menjual aset keluarga, atau meminjam ke koperasi. Perempuan petani mengatakan selain untuk kebutuhan sehari-hari selebihnya hanya bisa membeli pupuk, sementara nelayan hanya bisa membeli umpan untuk mencari ikan.

Sebagian perempuan tidak memiliki aset atas namanya sendiri, namun ada juga yang memiliki aset atas namanya berupa rumah, motor, tanah, sawah, kebun dan perahu. Ada yang didapat sejak masih belum menikah, ada juga aset tersebut atas nama ibu yang diwariskan. Ada perempuan yang bisa memiliki akses pinjaman ke koperasi untuk usaha rumput laut, dan koperasi simpan pinjam karena sebagai anggota koperasi, namun ada

juga yang sama sekali tidak punya akses untuk meminjam karena terpenuhinya persyaratan.

2. Perempuan dalam kehidupan sosialnya.

Kebanyakan perempuan tidak pernah mendapat undangan untuk menghadiri rapat-rapat kampung/kelu-
rahan sehingga tidak pernah hadir seperti musrembang.
Biasanya rapat di desa dihadiri oleh suami/laki-laki.
Ada juga yang pernah hadir rapat RT, namun tidak
diberi kesempatan untuk bertanya selama rapat ber-
langsung. Perempuan kebanyakan hanya terlibat
dalam kegiatan sosial, misalnya pesta perkawinan,
sosialisasi dan undangan keluarga atau tetangga.

Perempuan tidak sedikit mengalami hinaan dan
direndahkan dari lingkungan sekitarnya karena kondi-
sinya yang miskin, bahkan dipandang rendah oleh ke-
luarga sendiri. Hinaan juga dialami oleh perempuan





dengan status menikah namun tidak memiliki anak. Situasi buruk juga pernah dialami oleh perempuan pembela tanah adat, rumahnya digusur sehingga tinggal di dalam tenda, pernah dipaksa keluar dari tenda dan dilempar batu oleh aparat, dihina dan dicaci maki. Dalam situasi miskin dan tidak berdaya biasanya perempuan hanya diam mendapatkan perlakuan demikian.

3. Perempuan sebagai warga negara

Akses ke program bantuan pemerintah:

- Perempuan mengetahui adanya program pemerintah berupa PKH, KIS, BLT, Kusuka, KIP, KIS, program KB, dana BOS, raskin, UMKM tetapi sulit untuk diakses karena memiliki syarat yang banyak, diantaranya; harus menyeter KTP, KK, tabungan Bank BRI dan dokumen lainnya kemudian diserahkan ke kantor lurah. Ada juga dari mereka yang dapat mengakses bantuan berupa perahu, pukot, asuransi kesehatan. Ada juga yang sama sekali tidak dapat mengakses bantuan

pemerintah karena tidak memiliki KK dan KTP sebagai syarat utama untuk mendapatkannya.

Akses ke pelayanan administrasi negara:

- Kebanyakan perempuan bisa mendapatkan KTP dan KK. Namun ada juga yang sulit untuk mendapatkan KTP dan KK sehingga anaknya tidak bisa bersekolah.

Akses ke sumberdaya alam:

- Perempuan semakin sulit untuk mendapatkan ikan meskipun sudah berlayar ke tengah laut, hal ini disebabkan karena beberapa nelayan menggunakan bom untuk mendapat ikan sehingga terumbu karang dan tempat berkembang biak ikan rusak dan mati. Selain itu, laut tempat nelayan mencari ikan telah tercemar akibat banyaknya sampah plastik pasca Badai Seroja dan semakin banyaknya pembangunan hotel yang menutup akses nelayan untuk melaut. Sumber daya alam yang hilang juga tanaman bakau, habis ditebang. Dulunya di pesisir pantai banyak tanaman bakau, wilayah di sekitarnya hijau dan segar, ada bibit dari pemerintah, namun saat ini sudah gersang dan kering dan tidak ada lagi penyediaan bibit dari pemerintah.

4. Perubahan yang diinginkan perempuan

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan, adalah pemerintah;

- menindak tegas perusahaan yang masuk dan merusak hutan perempuan,
- memudahkan akses bagi perempuan untuk mendapatkan bantuan, adanya transparansi dan keterbukaan informasi pemerintah mengenai bantuan yang didistribusikan,

formasi pemerintah mengenai bantuan yang didistribusikan,

- melibatkan perempuan dalam rapat pengambilan keputusan.
- memberikan layanan yang baik bagi seluruh lapisan masyarakat untuk pengurusan administrasi kependudukan.
- bertanggungjawab untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah di rusak,
- sistem birokrasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah yang harus dipermudah,
- menyediakan lapangan kerja yang mudah diakses dan layak bagi perempuan,
- mengambil tindakan terhadap kondisi hilangnya tanah, kebun dan sawah akibat abrasi serta ancaman hilangnya tempat tinggal masyarakat.

[A]

Konsultasi di Jakarta

15 Desember 2021



KONSULTASI Perempuan di Jakarta diikuti 29 perempuan dari berbagai wilayah kota Jakarta, termasuk Pulau Pari dan provinsi tetangga seperti Tangerang dan Banten, menghadiri konsultasi ini. Latar belakang mereka adalah nelayan, pengupas kerang, pemulung, penyanyi jalanan dan pedagang kaki lima.

1. Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya.

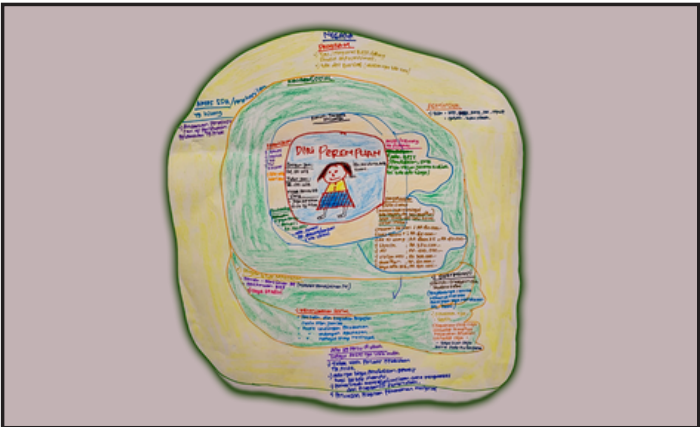
Sesuai dengan pembagian kerja dan sosial gender yang berlaku, perempuan memikul tanggung jawab kerja domestik yang berat dalam rumah tangga. Mereka harus bangun lebih pagi dari anggota keluarga lainnya. Rata-rata mereka bangun pada jam 4 pagi dan tidur malam paling cepat pada jam 22.00. Istirahat siang hanya dilakukan sesekali saja. Selain mengurus rumah tangga seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, memandikan dan mengantarkan anak ke sekolah, juga mendampingi anak belajar, dan mengurus orang sakit, serta menyiapkan berbagai keperluan suami untuk berkerja seperti melaut. Tidak jarang mereka juga terpaksa bekerja untuk mencari penghasilan tambahan untuk keluarganya.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik.

Perempuan yang hidup dalam keluarga miskin seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari lingkungan sekitar, seperti perlakuan diskriminasi seperti dikucilkan, dihina, dicaci, diremehkan tetangga dan keluarga; adik ipar, mertua, bahkan perlakuan kasar suami (KDRT), pengeroyokan anak, dimarahi keluarga suami karena pekerjaan yang dianggap memalukan. Diskriminasi ini seringkali diterima dengan pasrah akibat situasi

kemiskinan mereka dan anggapan dirinya yang lemah dan tidak berdaya. Perasaan-perasaan sedih, marah, terhina, sakit hati, kecewa, stress, terpuruk, malu sering mereka alami. Kadang ada saatnya mereka marah dan melawan, namun sebagian besar hanya mendiamkan saja dengan mempertimbangkan situasi kemiskinannya. Kalau melawan ada kekhawatiran bahwa akibatnya menjadi panjang.

Tidak dilibatkan dalam dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di kampung seperti rapat RT/RW, rapat proyek pembangunan, program-program subsidi pemerintah. Undangan selalu atas nama laki-laki sebagai kepala ke- luarga. Namun apabila miskin, bahkan ada keluarga/suami tidak diundang sama sekali. Kadang perasaan rendah diri muncul karena tidak diundang. Kadang-kadang ada juga perempuan datang dalam sebuah rapat pengambilan keputusan atas kesadarannya sendiri karena merasa itu bagian dari kepentingannya. Namun hal tersebut jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah tidak hadir karena



memang tidak ada undangan dan tidak mengetahui ada rapat di kampung. tidak mendapatkan subsidi, dan program bantuan pemerintah. Berbagai subsidi dari program pemerintah DKI Jakarta dan nasional didapatkan oleh warga Jakarta termasuk masyarakat nelayan, yaitu; Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bansos Lansia, Program Indonesia Pintar (PIP), BPUN, UMKM, BPJS. Namun program-program ini banyak yang tidak tepat sasaran. Sebagaian mereka ada yang mendapatkan namun sebagian tidak. Ada beberapa sebab, seperti tidak mendapatkan informasi, pindah tempat tinggal, akses hanya diperoleh orang terdekat dengan pejabat lokal. Mereka yang bersikap kritis dan melawan proyek reklamasi dan pembangunan usaha pariwisata di Pulau Pari, misalnya, sering tidak mendapatkan informasi tersebut.

Dianggap tempat tinggal illegal Jakarta. Wilayah-wilayah tertentu Jakarta Utara mendapatkan julukan ini. Penduduk yang tinggal di sini tidak mendapatkan akses ke air PAM akibat pelabelan dari tempat tinggal illegal. Masyarakat harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga.

Perempuan yang hidup dalam kungkungan budaya patriarki dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi baik karena dirinya sebagai perempuan dalam rumah tangga dan komunitasnya, juga menghadapi persoalan yang muncul dari wilayah yang merupakan sumber penghasilan maupun pendapatannya. Dalam potret perem-



puan miskin di Jakarta ini, kita melihat dua kelompok utama perempuan, yaitu perempuan nelayan dan perempuan bekerja di sektor informal.

Perempuan Nelayan.

- Persoalan yang dihadapi oleh para nelayan Jakarta sangat kompleks, termasuk proyek-proyek pembangunan dan iklim yang menggusur tempat tinggal dan menghilangkan sumber penghasilan mereka, seperti di antaranya pembangunan reklamasi pantai Jakarta, pembangunan tanggul raksasa, pembangunan banjir kanal, dan penanganan persoalan sosial yang tidak pernah diselesaikan, seperti isu kawasan ilegal dan penduduk pendatang. Isu-isu di atas memicu penggusuran tempat tinggal dan lahan di Jakarta Utara.
- Perempuan yang kehidupannya bergantung pada sektor perikanan di Jakarta melakukan berbagai pekerjaan seperti mencari ikan di laut, memproses hasil tangkapan, mengeringkan ikan dan mengelola kerang hijau. Mereka tinggal di pantai Jakarta utara

seperti Muara Baru, Cilincing, Marunda, dan Pulau Pari di kepulauan Seribu. Penduduk yang tinggal di wilayah ini, miskin.

- Perempuan nelayan di Jakarta Utara hidup dari hasil melaut dan mengelola hasil laut. Pendapatan di sektor ini sangat kecil, rata-rata harian Rp 100.000 per hari. Pengeluaran kebutuhan harian tersebut habis digunakan untuk kebutuhan seperti sandang, pangan, perumahan, transportasi, bayar sekolah anak, listrik, air, tabung gas, dan lainnya. Pendapatan itu juga diputar untuk modal melaut seperti biaya bensin, alat tangkap, perbaikan mesin kapal. Sering, pendapatan tersebut tidak mencukupi kebutuhan harian. Akibatnya, perempuan nelayan juga harus mengerjakan berbagai pekerjaan tambahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti berjualan baju keliling, mengelola makanan dan tangkapan laut lainnya. Sering penghasilan tambahan itupun masih belum mencukupi kebutuhan harian.
- Sementara itu penghasilan cenderung menurun saat mulai terjadi pembangunan di wilayah pantai seperti pembangunan reklamasi pantai, pembangunan dermaga, pembangunan pabrik Jakarta. Belum lagi masalah banjir rob dan banjir bandang, yang menyebabkan nelayan sulit untuk pergi melaut. Pencemaran laut yang terjadi, juga menurunkan hasil tangkapan, namun di lain pihak menambah pengeluaran keluarga yang menghadapi persoalan kesehatan akibat pencemaran.

Perempuan sebagai pekerja sektor informal.

- Perempuan pekerja informal di Jakarta meliputi an-

tara lain Pedagang Kaki Lima (PK5), penjaga parkir, penjahit, tukang urut, pengamen, pekerja rumahan, pedagang kecil (berjualan kopi, bekerja di warung orang, dan berjualan nasi), pedagang pakaian, Pekerja Rumah Tangga (PRT), pemulung, ojek online dan pekerja seks.

- Pendapatan di sektor informal sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rata-rata pendapatan harian sebesar Rp 40.000-50.000/ per hari. Pengeluaran harian habis digunakan untuk kebutuhan seperti sandang, pangan, perumahan, transportasi, bayar sekolah anak, listrik, air, dan lainnya. Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran minimum yang bisa dikeluarkan. Meski kadang ada juga tambahan pendapatan dari suami dan anak, namun tetap saja masih kurang. Kekurangan memenuhi kebutuhan harian biasanya ditutup dengan berhutang, atau pendapatan yang minim tersebut ‘dicukup-cukupkan’ untuk bertahan. Dalam beberapa kasus, banyak hutang yang dilakukan melalui pinjam ke kedai, tetangga atau pinjaman online (pinjol). Sebagian mereka tinggal di rumah kontrakan, bahkan ada yang tinggal di kolong jembatan dan tidur di lapangan. Isu pendaatang menjadi persoalan tersendiri sebagai warga Jakarta yang berimplikasi pada pengakuan dan pemenuhan hak warga Jakarta.

2. Perempuan sebagai warga negara

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi perempuan nelayan dan pekerja informal di Jakarta, antara lain disebabkan oleh:

- Kurangnya modal produktif perempuan: (a) kurangnya akses ke pendidikan.

Paling banyak perempuan di sektor ini tidak lulus SD dan tamat SD, namun ada juga yang mengecap SMP dan SMA. Alasan tidak melanjutkan sekolah disebabkan karena keadaan ekonomi orang tua yang sulit, dan ditinggal mati orang tua; (b) kurangnya akses ke pekerjaan yang layak yang ditandai dengan rendahnya pendapatan, jenis pekerjaan, waktu yang dihabiskan melakukan pekerjaan, dan tidak ada jaminan dalam pekerjaan, (c) kurangnya akses ke kesehatan dasar. Sebagian mereka tidak memiliki BPJS Kesehatan, juga tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Biaya BPJS menjadi pertimbangan bagi mereka yang berpendapatan rendah karena harus memilih membayar BPJS atau untuk kebutuhan makan, (c) perempuan kurang atau malah tidak memiliki harta/tabungan/warisan sehingga mereka



hidup dalam kemiskinan yang terus-menerus dari generasi ke generasi, termasuk tidak tempat tinggal dan alat produksi.

- Penggusuran yang menghilangkan sumber pendapatan. Banyak perempuan yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan, menjadi pengangguran akibat penggusuran. Pekerja kaki lima (PK5) kerap menjadi korban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan alasan melakukan penertiban di fasilitas umum, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) juga menghilangkan akses masyarakat ke tempat kerja yang lebih dekat, dan kebun tempat bercocok tanam digusur sehingga menghilangkan sumber pendapatan mereka. Beberapa pembangunan di wilayah pantai Jakarta menyebabkan penggusuran yang menghilangkan tempat tinggal dan mata pencaharian nelayan.



- Tidak mendapatkan subsidi, dan program bantuan pemerintah. Berbagai subsidi dari program pemerintah DKI Jakarta dan dari nasional didapatkan
- Dituduh sebagai pendatang ilegal di Jakarta sehingga tidak mendapatkan pasokan air dari PAM dan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga.
- Swastanisasi air. Persoalan air Jakarta menjadi masalah tersendiri. Air yang dikelola oleh PT Pallija berbau, kotor, mahal dan tidak lancar. Warga harus mengeluarkan lebih untuk kebutuhan air.
- Di Pulau Pari, selain sebagai nelayan, warga setempat termasuk perempuan juga hidup dari mengelola hasil pariwisata. Namun beberapa perusahaan membuka usaha pariwisata di wilayah dengan membangun hotel, resort, kuliner, dan lainnya. Saat ini masyarakat melakukan perlawanan untuk pembangunan ini proyek pariwisata di Pulau Pari;

3. Perubahan yang diinginkan perempuan:

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan, adalah pemerintah

- segera menghentikan reklamasi pantai dan segera melakukan pemulihan kak atas lingkungan yang telah rusak agar ikan, kerang dan kepiting bisa kembali ada;
- harus hadir di pulau Pari dan tidak berpihak pada pengusaha dengan membatalkan 76 sertifikat perusahaan yang dinyatakan sebagai mal-administrasi oleh ombudsmen Ori;
- melakukan perawatan terhadap kali Cilincing,

- menyediakan tempat sebagai mata pencaharian nelayan yang telah hilang akibat reklamasi pantai dan melakukan penanaman mangrove tanpa adanya pengurusan,
- tidak melakukan perluasan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok,
- tidak melakukan swastanisasi air,
- tidak melakukan pengurusan tempat tinggal masyarakat,
- tidak menyulitkan administrasi untuk dapat mengakses program bantuan Pemerintah,
- dapat menyiapkan lahan khusus untuk masyarakat berdagang,
- memperhatikan warga yang kurang mampu dan kesulitan untuk mendapatkan akses, baik pendidikan, kesehatan maupun program bantuan,
- Mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, khususnya pedagang kecil dan penyapu jalan.

[A]

Konsultasi di Palangkaraya

5 Januari 2022



SECARA keseluruhan 27 perempuan hadir dalam konsultasi di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang seperti tani, nelayan, buruh perkebunan, perempuan adat, pedagang kaki lima, supir ojek dan buruh. Mereka datang tidak saja dari kota Palangkaraya, tetapi juga dari daerah sekitarnya seperti Pulang Pisau, Barito Timur dan Kapuas.

1. Perempuan, kerja dan kebutuhan rumah tangganya

Sesuai dengan pembagian kerja dan sosial gender yang berlaku, perempuan memikul tanggung jawab kerja domestik yang berat dalam rumah tangga. Mereka harus bangun lebih pagi dari anggota keluarga lainnya. Rata-rata mereka bangun pada jam 4 pagi dan tidur malam paling cepat pada jam 22.00 Selain kerja di perkebunan, tugas-tugas di dalam rumah tetap dilakukan untuk mengurus keluarga seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, memandikan anak, mengantar ke sekolah, mendampingi anak belajar, dan mengurus orang tua.

Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga dan publik

- Perempuan yang hidup dalam kemiskinan seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari lingkungan sekitar, seperti;
- diskriminasi, dikucilkan, dihina, dicaci, dan diremehkan. Mereka sering mengalami perasaan sedih, kesal, malu, marah, terhina, sakit hati, dan kecewa. Misalnya, beberapa kasus pengucilan yang dialami perempuan penyadap karet dan buruh sawit karena situasinya yang miskin, statusnya yang janda, maupun karena pendidikannya yang rendah.



Selain itu ada stigma terhadap ibu tunggal/janda dianggap sebagai perayu suami orang; dan terhadap transpuan yang kurang diterima di masyarakat sehingga berimplikasi pada kesulitan mendapatkan pekerjaan.

- tidak dilibatkan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan di kampung, seperti rapat RT/RW, rapat proyek pembangunan dan program subsidi/bantuan pemerintah. Undangan selalu diperuntukan laki-laki/suami kepala keluarga; bahkan pernah ada pernyataan bahwa perempuan lebih cocok tinggal di rumah sehingga tidak perlu diundang dalam rapat. Situasi kemiskinan juga menyebabkan bahwa ada keluarga/suami tidak diundang sama sekali
- tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Beberapa di antaranya bahkan tidak diundang dalam acara keagamaan dan kegiatan sosial.
- tidak mendapatkan subsidi, dan program bantuan pemerintah. Berbagai subsidi dari program pemerintah daerah dan nasional didapatkan oleh warga di Kalimantan Tengah, yaitu; KIA, KIP, BPJS, PKH, BLT, KSS, Subsidi UMKM, subsidi prakerja, vaksin dan subsidi Covid-19.

- digusur dari tanahnya akibat pembangunan pertambangan, dan kehilangan akses ke hutan untuk sumber pendapatan dan makanan.

Perempuan yang hidup dalam kungkungan budaya patriarki dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi baik karena dirinya sebagai perempuan dalam rumah tangga dan komunitasnya, juga menghadapi persoalan yang muncul dari wilayah yang merupakan sumber penghasilan maupun pendapatannya. Potret perempuan miskin Kalimantan Tengah ini dari konsultasi lokal tersebut, dapat dikelompokkan pada 3 kelompok utama, yaitu perempuan yang bekerja di sektor perkebunan, pertanian dan di sektor informal.

Sektor perkebunan

- Perempuan yang berkerja di perkebunan di Kalimantan Tengah merupakan penyadap karet dan buruh kelapa sawit.
- Pendapatan di sektor ini diperoleh dari bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan sebagai penyadap karet di kebun sendiri atau kebun orang lain. Pendapatan per hari dari bekerja di sektor perkebunan rata-rata sebesar Rp 50.000-150.000 per hari, sedangkan pekerjaan sebagai buruh sawit menerima gaji sebesar Rp 116.000 per hari. Pendapatan ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari untuk membeli sembako, membayar transportasi, sekolah anak, listrik, cicilan motor, jajan anak, maupun rokok suami. Meski ada beberapa orang yang mengatakan pendapatan cukup untuk me-

memenuhi kebutuhan sehari-hari karena ada pendapatan tambahan dari suami dan keluarga terdekat, namun sebagian besar mengatakan tidak cukup.

Sektor Pertanian

- Perempuan yang bekerja di sektor pertanian meliputi perempuan berkebun, bertani, dan beternak. Rata-rata pendapatan dalam sebulan sebesar Rp 300.000-3.000.000 . Penghasilan yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun ada tambahan penghasilan dari orang serumah seperti dari suami, anak, saudara, orang tua dan keponakan. Penghasilan yang diperoleh adalah untuk membeli kebutuhan dapur, keperluan anak, rokok suami, pembayaran listrik, jajan anak, paket data, kredit motor, bayar arisan. Selain itu perempuan juga mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil hutan sebagai sumber pangan. Namun sejak terjadi penebangan liar, hasil hutan menurun dan akses ke air bersih hilang.



Sektor Informal

- Pekerjaan di sektor informal di Kalimantan Tengah di antara perempuan yang hadir dalam konsultasi tersebut, terdiri dari menganyam rotan, berjualan kerupuk, memiliki usaha warung, berjualan online, penyewaan mobil, mengajar les privat, memproduksi herbal, dan pekerja sosial disabilitas.
- Pendapatan perempuan di sektor ini sangat kecil, berkisar Rp 20,000-150.000/ per hari yang diperuntukan membeli sembako, transportasi, membayar sekolah anak, listrik, cicilan motor, jajan anak, rokok suami, kosmetik, BPJS dan membeli obat. Pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa di antara mereka mendapat tambahan pendapatan dari suami, anak dan keluarga lain yang tinggal serumah sehingga ada yang mengatakan pendapatannya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Beberapa di antara pekerja informal ini berstatus sebagai ibu tunggal pencari nafkah keluarga, transpuan, dan penyandang disabilitas yang banyak mendapat stigma masyarakat. Kelompok ibu tunggal penjual makanan terancam pengusuran karena tempat usahanya dianggap ilegal; penyandang disabilitas sering mendapat kesulitan untuk bergerak di ruang publik karena tidak ada sarana khusus bagi mereka, misalnya jalan khusus untuk kursi roda. Selain itu, perempuan disabilitas juga tidak memiliki akses untuk menguasai dan memanfaatkan lahan produktif karena wilayah tempat tinggal berada di perkotaan. Sementara transpuan mendapatkan stigma penentang kodrat yang membuat mereka sulit diterima masyarakat dan sulit mendapatkan pekerjaan.

2. Perempuan sebagai warga negara.

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi perempuan di sektor perkebunan, pertanian dan pekerja informal di Kalimantan Tengah, antara lain disebabkan terutama oleh kurangnya modal produktif perempuan akibat:

- akses ke pendidikan. Pendidikan yang dikecap mulai tamat SD-SMA. Mereka yang tidak melanjutkan sekolah mengatakan alasannya karena tidak ada biaya padahal ingin sekali melanjutkan sekolah;
- kurangnya akses ke pekerjaan yang layak seperti kecilnya pendapatan, jenis pekerjaan, waktu kerja yang lama, dan tidak ada jaminan dalam pekerjaan. Sebagian mereka mengatakan tidak mudah mengakses pekerjaan yang layak karena terbatas.
- kurangnya akses ke kesehatan dasar. Biaya kesehatan yang mahal menambah pengeluaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Apabila ada anggota keluarga yang sakit, maka alokasi dana digunakan untuk membiayai kesehatan. Sementara itu fasilitas kesehatan minim. Meskipun ada posko kesehatan, namun tidak ada tenaga kesehatan yang bertugas. Beberapa perempuan tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- kurang/tidak adanya harta/tabungan/warisan yang dimiliki perempuan menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan yang terus-menerus dari generasi ke generasi.

Mereka tidak mendapatkan subsidi, dan program bantuan pemerintah karena tidak mengetahui informasi tersebut, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, dan karena memiliki status pensiunan. Selain itu penggusu-

ran akibat pembangunan pertambangan dan kehilangan akses ke hutan, juga menjadi faktor penyebab kemiskinan perempuan.

3. Perubahan yang diinginkan perempuan:

Beberapa usulan perubahan yang diinginkan perempuan terhadap pemerintah:

- menghentikan perizinan perusahaan kelapa sawit.
- mengesahkan segera RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
- menghapus larangan membakar lahan.
- menindak tegas perampasan tanah dan merusak lingkungan termasuk hutan, tanah dan sumber daya alam lainnya,
- segera melakukan evaluasi perizinan tambang yang beroperasi dan mencabut UU Mineral dan batu bara,
- melakukan evaluasi terhadap kinerja KLHK, Kementerian ATR/BPN
- segera melakukan pengesahan terhadap RUU Masyarakat Adat.



- memperhatikan hak petani, termasuk perempuan,
- menghentikan perizinan perusahaan kelapa sawit
- segera melakukan pengesahan peraturan daerah yang diusulkan oleh 7 (tujuh) organisasi disabilitas di Kalimantan Tengah yang telah disampaikan pada Komisi III.
- memberikan akses yang lebih mudah dan memprioritaskan masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan
- menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat, khususnya perempuan
- mengakomodasi keterlibatan perempuan dalam ruang social dan politik
- memberikan ruang yang sama bagi komunitas LGBTIQ.

[a]

Penutup

PEREMPUAN dari 10 wilayah kota Indonesia telah berbicara mengenai situasi ketimpangan gender dan ekonomi yang mereka alami dan menganalisis sebab-akibatnya, yaitu jalinan kekuasaan patriarki, kepentingan ekonomi global, tata kelola negara yang mengabaikan kepentingan kelompok miskin dan marjinal, yang menguasai dan mempengaruhi kehidupan perempuan dalam keluarga, komunitas dan negara Republik Indonesia ini.

Ketimpangan gender dan ekonomi yang dihadapi oleh para perempuan tersebut, tidak lepas dari keputusan negara dalam membangun perekonomian negara. Di lain pihak negara juga dipengaruhi oleh kepentingan internasional baik dalam hal investasi dan perdagangan. Karenanya, situasi dan aspirasi para perempuan akar rumput tersebut perlu dibawa ke dialog multipihak sebagai masukan kepada para pengambil keputusan di tingkat nasional untuk memperhatikan pandangan perempuan dan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender dan ekonomi yang dihadapi perempuan.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para fasilitator di setiap kota yang berlangsung konsultasi tersebut. Tanpa dukungan mereka dalam menyiapkan konsultasi baik mencari peserta perempuan akar rumput, menyiapkan kebutuhan logistik dan kemudian mendampingi proses konsultasi, tidak lah mungkin semua konsultasi tersebut berjalan dengan lancar dan memberikan hasil seperti yang diinginkan.

Mereka adalah Rori Marwani dan Hutri Jewi di Jayapura, Anggi Ria Awalia dan Nur Isa Dessi di Makassar, Baihajar Tualeka dan Hilda Rolobessy (almarhumah) di Ambon, Nurlaela dan Ghiyas Konita di Purwokerto, Selvia Ayyu Netra dan Intan Yones Astika di Bengkulu, Ni Nengah Budawati dan Ni Wayan Suciati di Tabanan, Angela Manihuruk dan Leorana Sihotang di Prapat, Linda Tagie dan Weltji Doek di Kupang, Rehwindi Naibaho dan Herdayati di Jakarta, Herta Linso Sihotang dan Evi Nurleni di Palangkaraya. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pencatat proses dan notulensi. Karena tanpa notulensi yang mereka berikan, tidaklah mungkin prosiding ini bisa dibuat.

Akhir kata kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan finansial European Commission untuk kegiatan konsultasi dalam konteks Program *“Raising the voices of communities on the front-line in the fight against economic inequalities”* (Mengangkat Suara Komunitas di Garis Depan Melawan Ketimpangan Ekonomi). [A]



PENERBITAN prosiding konsultasi di 10 kota Indonesia ini merupakan ruang yang disediakan untuk membantu menyuarakan persoalan ketimpangan gender dan ekonomi yang dihadapi terutama oleh perempuan di garis depan persoalan ini, yaitu perempuan miskin.

Prosiding konsultasi di 10 kota ini memperlihatkan realitas perempuan dalam situasi kemiskinan, proses pemiskinan dan ketidakadilan.

Selanjutnya, prosiding ini juga menggambarkan pemahaman perempuan terhadap persoalannya dan analisis mereka terhadap persoalan yang dihadapi, yaitu kausalitas faktor-faktor kemiskinan, pemiskinan dan ketidakadilan dalam konteks jalinan kekuasaan patriarki, globalisasi, militarisme dan fundamentalisme. []

